

**ANALISIS PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN
KARAKTER PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
(IMPLEMENTASI DI SEKOLAH DASAR NEGERI RINTISAN
PENDIDIKAN KARAKTER)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Manajemen Pendidikan Tinggi (M.Pd)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

EVI OCTOVIYANTI SIREGAR
NPM : 1920060042



**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **EVI OCTOVIYANTI SIREGAR**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1920060042**

Program Studi : **Magister Manajemen Pendidikan Tinggi**

Konsentrasi :

Judul Tesis :

**ANALISIS PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN
KARAKTER PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
(IMPLEMENTASI DI SEKOLAH DASAR NEGERI
RINTISAN PENDIDIKAN KARAKTER)**

Pengesahan Tesis

Medan, 28 September 2021

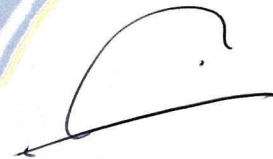
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. SRI NURABDIAH PRATIWI, M.Pd

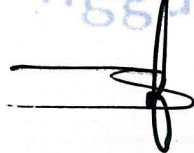


Dr. SALIM AKTAR, M.Pd

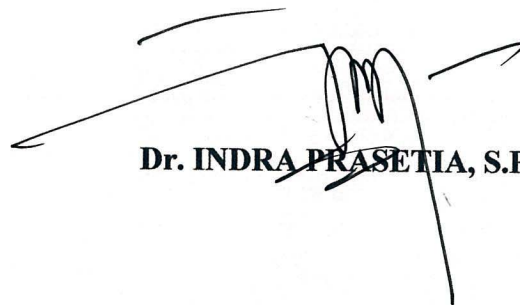
Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP



Dr. INDRA PRASETIA, S.Pd, M.Si

PENGESAHAN

ANALISIS PROGRAM Penguatan Pendidikan Karakter pada Dinas Pendidikan Kota Binjai (Implementasi di Sekolah Dasar Negeri Rintisan Pendidikan Karakter)

EVI OCTOVIYANTI SIREGAR

1920060042

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd) Pada Hari Selasa, Tanggal 28 September 2021

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. AKRIM, M.Pd**

Ketua

1.....

2. **Dr. EMILDA SULASMI, M.Pd**

Sekretaris

2.....

3. **Dr. INDRA PRASETIA, S.Pd, M.Si.**

Anggota

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS PROGRAM Penguatan Pendidikan Karakter Pada Dinas Pendidikan Kota Binjai (Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Negeri Rintisan)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan /atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian – bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 06 September 2021

Penulis



EVI OCTOVIYANTI SIREGAR

NPM. 1920060042

ABSTRAK

Pendidikan KaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penguatan pendidikan karakter yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Binjai pada Sekolah Dasar Negeri rintisan pendidikan karakter, dan untuk mengetahui apakah implementasi penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Negeri Rintisan Efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif bersifat campuran dengan metode embedded. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Binjai Jl. Gunung Merapi No.1, Binjai Estate, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara. Sumber data penelitian ini adalah 2 (dua) orang UPTD, 1 (satu) orang pengawas sekolah, 3 (tiga) orang kepala sekolah, dan 30 (tiga puluh) guru. Wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai instrument pengumpulan data. Temuan penelitian ini adalah implementasi program pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan dasar di kota Binjai telah dilaksanakan kordinasi, kordinasi yang dilakukan melalui (1) pertemuan dan (2) rapat-rapat. Dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter meliputi; (1) membuat edaran tertulis kepada UPTD mengenai kebijakan pendidikan karakter; (2) memberikan sosialisasi pada sekolah-sekolah, baik dengan anggaran pemerintah kota Binjai sendiri maupun sebagai pelaksana program pemerintah pusat; (3) hadir dalam uji publik kurikulum sekolah untuk melihat sampai sejauh mana itu pendidikan karakter sudah termuat dalam kurikulum sekolah; dan (4) pendampingan ke sekolah, meskipun tidak secara khusus untuk pendidikan karakter tetapi peningkatan mutu sekolah secara umum, (5) memberikan pelatihan meskipun masih dinilai belum maksimal. Dukungan sarana dan prasarana yang diberikan Dinas Pendidikan bagi pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah antara lain yakni memberikan dukungan sarana belajar dan pedoman kurikulum. Sedangkan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia disekolah seperti fasilitas ibadah, tempat temuan barang hilang, kantin kejujuran, tata tertib sekolah, catatan kehadiran, pajangan kata mutiara, media komunikasi dan informasi, perpustakaan, dan sarana kebersihan. Dinas Pendidikan telah memberikan pendampingan terhadap penyelenggaraan program pendidikan karakter, seperti pendampingan teknis pelaksanaan dan implementasi kurikulum yang terintegrasi pendidikan karakter. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap implementasi pendidikan karakter dilakukan secara terpadu, yakni dinas pendidikan melalui pengawas sekolah, Kepala sekolah, guru dan orang tua siswa. Hasil pelaksanaan evaluasi kinerja kebijakan dilaporkan baik kepada dinas pendidikan melalui pengawas sekolah maupun para orang tua siswa. Pelaksanaakn program penguatan pendidikan karakter telah efektif. Temuan penelitian menunjukkan 92,5% responden menyatakan sangat setuju. Ini berarti pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter oleh Dinas Pendidikan di nilai sudah efektif, 5,5% responden menyatakan efektif, sedangkan sebanyak 1% responden menyatakan belum efektif.

Kata kunci : Penguatan Pendidikan Karakter

ABSTRACT

Education KaThis research aims to find out how the strengthening of character education carried out by the Binjai City Education Office at State Elementary Schools for character education pilots, and to determine whether the implementation of strengthening character education in State Elementary Schools is Effective. This research is a mixed qualitative and quantitative research with embedded methods. This research was conducted at the Binjai Education Office Jl. Mount Merapi No.1, Binjai Estate, South Binjai, Binjai City, North Sumatra. The data sources for this study were 2 (two) UPTDs, 1 (one) school supervisor, 3 (three) principals, and 30 (thirty) teachers. Interviews, questionnaires, observations, and documentation were used as data collection instruments. The findings of this study are the implementation of character education programs at the basic education unit level in the city of Binjai has been carried out in coordination, coordination is carried out through (1) meetings and (2) meetings. The Education Office's support in implementing character education includes; (1) make a written circular to the UPTD regarding the character education policy; (2) provide socialization to schools, both with the budget of the Binjai city government itself and as implementers of the central government program; (3) attending the school curriculum public test to see to what extent character education has been included in the school curriculum; and (4) assistance to schools, although not specifically for character education but improving the quality of schools in general, (5) providing training even though it is still considered not yet maximum. Support for facilities and infrastructure provided by the Department of Education for the implementation of character education in schools, among others, is to provide support for learning facilities and curriculum guidelines. Meanwhile, support for facilities and infrastructure available at schools such as worship facilities, places for finding lost items, honesty canteens, school rules, attendance records, display of pearls of wisdom, communication and information media, libraries, and cleaning facilities. The Education Office has provided assistance to the implementation of character education programs, such as technical assistance in the implementation and implementation of an integrated character education curriculum. The evaluation and assessment of the implementation of character education is carried out in an integrated manner, namely the education office through school supervisors, school principals, teachers and parents of students. The results of the implementation of the policy performance evaluation are reported to both the education office through the school supervisor and the students' parents. The implementation of the character education strengthening program has been effective. The research findings show that 92.5% of respondents strongly agree. This means that the implementation of the character education strengthening program by the Education Office is considered effective, 5.5% of respondents said it was effective, while 1% of respondents said it was not yet effective.

Keywords: Strengthening Character Education

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga proposal ini dapat selesai dengan tepat waktu, Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada ruh junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad Saw. Dan penulis merasa bersyukur karena sudah bisa menyusun Tesis saya yang berjudul “ Analisis Program Penguatan Pendidikan Karakter Pada Dinas Pendidikan Binjai (Implementasi Program Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Negeri Rintisan)”. Selama penyusunan tesis ini, penulis memperoleh begitu banyak bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Agussani, M.AP Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP Direktur Pasca Sarjana UMSU
3. Bapak Dr. Indra Prasetia, S.Pd, M.Si Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi sekaligus Dosen Penguji II
4. Ibu Dr. Sri Nurabdiah Pratiwi, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing I pada penyusunan tesis
5. Bapak Dr. Salim Aktar, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing II pada penyusunan tesis
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Akrim, M.Pd sebagai Dosen Penguji I
7. Ibu Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd sebagai Dosen Penguji II
8. Bapak Dr.Indra Prasetia ,S.Pd,M.Si sebagai Dosen Penguji III

9. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tidak pernah bosan dan selalu memberikan doa dan semangat untuk penyempurnaan tesis ini.
10. Keluarga Penulis yang selalu memberikan doa dukungan secara fisik dan moral dan kerja sama yang baik dalam penyelesaian tesis ini
11. Bagi anak-anak penulis yang tercinta yang selalu mendoakan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
12. Bagi sahabat-sahabat penulis di Prodi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi yang sama –sama berjuang dalam penyelesaian pendidikan, yang turut memberikan motivasi dan saling menyemangati dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan pemikiran bagisemua orang, khususnya bagi penulis hingga terselesainya tesis ini tepat pada waktunya.

Medan, September 2021
Penulis

EVI OCTOVIYANTI SIREGAR
NPM : 1920060042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Kerangka Teoritis.....	12
2.1.1. Pendidikan Karakter.....	12
2.1.2 Nilai-Nilai dan Tujuan Pendidikan Karakter	17
2.1.3 Peran Pemerintah Dalam Pendidikan Karakter.....	20
2.1.4 Efektivitas Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter	24
2.2 Kerangka Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Tempat dan Jadwal Penelitian	34
3.2 Latar Penelitian.....	34
3.3 Metode dan Prosedur Penelitian	35
3.4 Data dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	37
3.6 Prosedur Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	44

4.2 Temuan Khusus Penelitian.....	58
4.2.1 Deskripsi Data Kualitatif	58
4.2.2 Deskripsi Data Kuantitatif	78
4.3 Pembahasan.....	80
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Implikasi.....	87
5.3 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masyarakat, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab tersebut didasari kesadaran bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pada kebudayaan suatu daerah, karena bagaimanapun juga, kebudayaan tidak hanya dari naluri semata tapi dilahirkan dari proses belajar dalam arti yang sangat luas. dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membantu seorang anak untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung agar mampu bermanfaat bagi kehidupannya dimasyarakat.

Mengutip pendapat Ahmadi (2004 :74) bahwa pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar dimana perubahan-perubahan di dalam tingkah laku dihasilkan di dalam diri orang itu melalui kelompok. Dari pandangan ini pendidikan adalah suatu proses yang mulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi pendidikan Nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan undang-undang ini, sistem pendidikan dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian agar dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis.

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan. Masalah pendidikan adalah merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Bukan saja sangat penting, bahkan masalah pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar di tentukan oleh maju mundurnya pendidikan di negara itu. Posisi nilai pendidikan yang hilang dari kurikulum pendidikan formal disinyalir oleh beberapa kalangan menjadi salah satu penyebab akan berkurangnya moralitas yang tercermin dari masyarakat dengan tingginya angka kriminalitas sekarang ini. Menurut Dimiyati dan Mudjiono

(2002:23) pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab siswa dan tenaga kependidikan saja melainkan dari lingkungan sekitarnya seperti orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah yang harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam dunia pendidikan. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak yang lahir sejak awal kehidupannya, dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan.

Melihat kondisi permasalahan permasalahan generasi bangsa di era globalisasi ini cukup memprihatinkan, banyaknya kasus-kasus yang menyangkut dunia pendidikan akhir-akhir ini hingga menjadi sesuatu yang viral di Indonesia. Fenomena ini sangatlah disayangkan oleh banyak pihak karena mereka adalah calon penerus bangsa yang diharapkan dapat membuat bangsa ini menjadi semakin baik. Sebagaimana menurut Ahmadi (2004:51) semakin hari permasalahan mengenai krisis moral ini sudah semakin memprihatinkan, maraknya kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah seperti mencontek, membolos, tauran, pergaulan bebas, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya merupakan bukti bahwa moral generasi penerus bangsa ini sudah sangat rusak.

Mencermati persoalan pendidikan tersebut, Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Penguatan Karakter (PPK). Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah tentang program pendidikan berbasis karakter tersebut, merupakan suatu alat yang diharapkan oleh pemerintah untuk memperbaiki perilaku dan moralitas kaum muda Indonesia sebagai kaum penerus bangsa Indonesia. Pusat

memberikan mandat kepada setiap daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yakni Dinas-Dinas Pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana Widjaja (2005:41) menyatakan pendidikan penguatan karakter adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik dan spriritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila.

Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Widodo (2011:21) pada hakekatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik. Rifai (2015:98) selain lima nilai utama karakter, melalui penguatan pendidikan karakter, mendorong peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi generasi muda. Selanjutnya, Saepulloh (2017:86) mengatakan bahwa pendidikan karakter sangatlah penting, mengingat Kabupaten Bekasi sedang mengalami pergeseran nilai dan kultur. Menurut Kemendikbud (2019:5) bahwa gerakan penguatan pendidikan karakter menempati kedudukan fundamental dan strategis pada saat pemerintah mencanangkan revolusi karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam Nawacita (Nawacita 8), menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan menerbitkan RPJMN (2014-2019) berlandaskan Nawacita. Sebab itu, gerakan penguatan pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pengejawantahan Gerakan Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita. Nugroho (2014:87) gerakan penguatan pendidikan karakter menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi

terdalam atau inti pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, menurut Nugroho (2014:89) penguatan pendidikan karakter perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang.

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter merupakan rambu-rambu atau aturan penting tentang pengelolaan pendidikan yang mampu mengembangk karakter sumber daya manusia yang wajib dilaksanakan dan diimplementasi oleh Dinas Pendidikan di daerah. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan Kabupaten/Kota dimana semua tingkatan sekolah masih di kewenangan Kabupaten Kota. Sebagaimana halnya Dinas Pendidikan Kota Binjai, di tahun 2019 telah menggalakan program penguatan pendidikan karakter yang digalakan di sekolah-sekolah diharapkan dapat memperkuat bakat, potensi dan talenta seluruh peserta didik.

Dinas Pendidikan Kota Binjai dalam mengemban amanat pendidikannya, dengan visi adalah terwujudnya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya. Berkarakter memiliki makna sumber daya manusia pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal. Kota Binjai yang dikenal sebagai kota rambutan dan jambu madu serta berbagai wisata dan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya, moral dan nilai religiusitas. Berbagai kearifan lokal inilah yang menjadi kebanggan dan merupakan ciri khas

masyarakat Kota Binjai. Sebagai kota yang berdekatan dengan Kota Medan, khususnya berada di sebelah barat ini, tentunya merupakan daerah yang sangat strategis dalam mengemban misi pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Kota Binjai melalui revolusi mental yang diimplementasikan melalui penguatan pendidikan karakter yang di programkan pada intinya dalam mencapai cita-cita pembangunan sumberdaya manusia seutuhnya bagi masyarakat binjai.

Implementasi program penguatan pendidikan karakter di kota Binjai yang telah terselenggara mulai 2018, telah terbentuk sebanyak 246 sekolah (SD dan SMP) tergabung menjadi sekolah percontohan penerapan program Penguatan Pendidikan Karakter. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah yang telah menerapkan berbagai praktik baik pendidikan karakter sehingga diharapkan menjadi contoh/teladan dan menularkan "virus kebaikan" dalam penerapan penguatan pendidikan karakter di sekitarnya. Sekolah-sekolah yang dipilih juga ditentukan berdasarkan keterwakilan provinsi, kondisi geografis, maupun status sekolah negeri dan swasta. Sedangkan untuk Sekolah Dasar di kota Binjai ada sebanyak 176 Sekolah Dasar yang terdiri dari 124 sekolah negeri dan 52 sekolah swasta. Saat ini, *pilot project* dari kebijakan Dinas Pendidikan Kota Binjai tersebut telah terselenggara sebanyak 17 Sekolah Dasar Negeri dan 13 Sekolah Dasar Swasta yang sudah terlebih dulu melakukan Pendidikan Penguatan Karakter. Jumlah tersebut tentunya dapat mengalami kenaikan yang pasti mengingat kebijakan pendidikan penguatan karakter merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah. Gerakan pendidikan penguatan karakter Dinas Pendidikan Binjai berfokus pada struktur yang sudah ada dalam

sistem pendidikan nasional. Sumber Dinas Pendidikan Binjai (2020) menyebutkan terdapat tiga struktur yang dapat digunakan sebagai wahana, jalur, dan medium untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa, yaitu: (1). Struktur Program, antara lain jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, penguatan kapasitas guru; (2) Struktur Kurikulum, antara lain kegiatan pembentukan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran (intrakurikuler), kokurikuler, dan ekstrakurikuler; (3). Struktur Kegiatan, antara lain berbagai program dan kegiatan yang mampu mensinergikan empat dimensi pengolahan karakter (olah raga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati).

Pada dasarnya keberhasilan penyelenggaraan sebuah kebijakan tentunya memerlukan sebuah komitmen yang tinggi dalam pelaksanaannya sebagai eksekutor yang dapat berasal dari instansi maupun lembaga pada pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Binjai. Dalam kebijakan pendidikan penguatan karakter yang diprogramkan Dinas Pendidikan Kota Binjai masih terlihat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sebagaimana data yang telah diuraikan di atas, program pendidikan penguatan karakter masih terfokus pada tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan pelaksanaannya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) masih dalam proses tahapan sosialisasi. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan sumber dari Dinas Pendidikan kota Binjai menyimpulkan bahwa penyelenggaraan program pendidikan penguatan karakter masih belum terlaksana dengan baik, program masih terselenggara pada pendidikan dasar dan menengah pertama. Kondisi ini disebabkan belum matangnya program yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan

Teknis Dinas, dalam hal menyangkut (1) tenaga ahli dan teknis, (2) struktur program dan nilai-nilai karakter yang diprogramkan, (3) sarana, prasarana dan anggaran. Sedangkan kendala yang ada di sekolah pada umumnya sekolah belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan visinya, Umumnya sekolah menghadapi kesulitan memilih nilai karakter mana yang sesuai dengan visi sekolahnya. Hal itu berdampak pada gerakan membangun karakter di sekolah menjadi kurang terarah dan fokus, sehingga tidak jelas pula monitoring dan penilaiannya. Selain itu, pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter yang masih belum menyeluruh. Jumlah guru di kota Binjai yang mencapai 10.767 orang dari berbagai tingkatan, merupakan sasaran program yang sangat besar. Program pendidikan karakter belum dapat disosialisasikan pada semua guru dengan baik menyangkut pembinaan maupun pelatihan sehingga mereka belum memahaminya.

Memperhatikan permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa program dan implementasi pendidikan penguatan karakter yang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, secara umum belum terselenggara dengan baik, selain itu dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan secara nasional akan pentingnya penanaman pendidikan karakter sejak dini, sebagai solusi bagi penanganan krisis mental dan karakter siswa melalui jalur pendidikan. Sebagaimana menurut Rifai (2011:57) sekolah sebagai wahana pembelajaran tak diragukan berperan besar dalam pengembangan karakter siswa. Sekolah telah mengantar anak-anak dan remaja dalam menyelesaikan tugas perkembangannya hingga memasuki masa dewasa dengan baik. Sebagaimana Rosyid (2010)

pendidikan di Indonesia sudah saatnya untuk memihak kepada kompetensi, baik kompetensi keahlian maupun kompetensi karakter; bukan hanya kompetensi matematika, kimia, fisika, dan sejenisnya.

Kondisi-kondisi sebagaimana digambarkan di atas, tentunya memerlukan pemecahan yang fundamental dan komprehensif. Pemecahan mendasar terkait dengan pendidikan moral dan motivasi diri, dan pemecahan komprehensif mencakup seluruh lapisan masyarakat dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Binjai. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Muatan Lokal Pada Dinas Pendidikan Binjai”.

1.2 Fokus Penelitian

Pengorganisasian gerakan penguatan pendidikan karakter merupakan mekanisme koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem pendidikan yang terkait dengan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter. Seluruh pelaku membentuk jejaring dan kolaborasi secara terintegrasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Keberhasilan penguatan pendidikan karakter ini tentunya sangat bergantung oleh Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kota Binjai yang memegang peranan penting dalam mendampingi, membina, dan mengarahkan satuan pendidikan dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Berkaitan itu, maka fokus penelitian ini yakni implementasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter berbasis muatan lokal oleh Dinas Pendidikan kota Binjai, mencakup : (1) implementasi kordinasi dengan satuan pendidikan; (2). implementasi dukungan pelaksanaan program pada satuan

pendidikan; (3). implemenasi dukungan sarana dan prasarana program pada satuan pendidikan; (4). implementasi pendampingan pelaksanaan program pada satuan pendidikan; dan (5). implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di satuan pendidikan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan pendidikan karakter yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Binjai pada Sekolah Dasar rintisan pendidikan karakter meliputi aspek kordinasi,dukungan sarana prasarana ,pendampingan dan monitoring serta evaluasi ?
2. Apakah implementasi penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Negeri Rintisan efektif ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penguatan pendidikan karakter yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Binjai pada Sekolah Dasar Negeri rintisan Pendidikan Karakter.
2. Untuk mengetahui apakah implementasi penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Negeri Rintisan efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoretis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan karakter.
- b. Diharapkan bermanfaat dan dapat merangsang peneliti lain untuk meneliti aspek-aspek lain yang belum tersentuh dalam penelitian ini.
- c. Dapat dijadikan sebuah pertimbangan dan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa. Menambah pengetahuan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang terfokus pada pendidikan karakter.
2. Bagi Kepala sekolah dan guru. Dapat memberikan gambaran tentang sekolah dan program-sekolah tentang pendidikan karakter.
3. Bagi pemerintah. Dapat membantu pemerintah terkhusus Dinas Pendidikan kota Binjai dalam implementasi program penguatan pendidikan karakter oleh berbagai satuan pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan kota Binjai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Pendidikan Karakter

Dalam kamus Bahasa Indonesia (2008) disebutkan bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak/budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Kata karakter berasal dari Yunani, *charassein*, yang berarti *to engrave* atau mengukir di atas batu permata atau permukaan besi yang keras. Karakter menurut Bohlin (2001) *an individuals pattern of behavior...his moral constitution*. Mulyasa (2012:3) menjelaskan bahwa kata “*character*” (“karakter” dalam bahasa Indonesia) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *kharaktēr/eharassein* yang berarti “to mark” atau “to engrave) (menandai/mengukir). Tentunya, “menandai” atau “mengukir” tidak dimaknai sebatas harfiah saja. Jika diinterpretasikan, hal tersebut dapat berarti mengukir nilai-nilai positif baik dalam konsepsi dan tindakan nyata dalam perilaku sehari-hari. Menurut Kesuma (2013:54) pendidikan karakter adalah segala upaya untuk mengarahkan, melatih, memupuk nilai-nilai baik agar menumbuhkan kepribadian yang baik, bijak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan dan masyarakat luas. Salahudin dan Alkrienciehie (2013:42) berpendapat bahwa karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Samani dan Hariyanto (2013:41) sebagai

sesuatu yang khas dari seseorang sebagai cara berfikir dan perilaku untuk hidup dan bekerjasama dalam hubungannya dengan sesama yang dapat membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya

Selanjutnya, pendidikan adalah berbagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif belajar dan mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik dari segi kecerdasan, pengetahuan, kepribadian. Samani dan Hariyanto (2013:45) pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang digunakan untuk menanamkan dan mengembangkan karakter kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter yang luhur setelah memiliki maka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat (Wibowo, 2013:40).

Berdasarkan pemaparan tersebut, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (*moral knowing*), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau *loving good (moral feeling)*, dan perilaku yang baik (*moral action*). Pendidikan karakter menekankan pada *habit* atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan.

Dalam Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025 disebutkan, bahwa karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa & bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen NKRI.

Karakter terdiri dari banyak unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Karakter setidaknya terdiri dari tiga ranah yang saling berhubungan, yakni: pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral yang disebut dengan sistem karakter. Lickona dan Amirulloh (2015:4-18) menjelaskan bahwa sistem karakter terdiri tiga ranah yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, yakni:

1. Pengetahuan Moral (Moral Knowledge)

Pengetahuan moral adalah kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, mempertimbangkan, membedakan, menginterpretasikan macam-macam moral yang harus diterapkan dan yang harus ditanggalkan. Pengetahuan moral terdiri dari enam komponen yang meliputi:

Kesadaran Moral, merupakan kesadaran untuk memperhatikan dan melaksanakan moral yang ada di sekitarnya.

Pengetahuan Nilai Moral, kemampuan untuk memahami nilai moral dalam berbagai situasi.

Memahami Sudut Pandang Lain, adalah kemampuan untuk menghargai dan merasakan pendapat orang lain.

Penalaran Moral, kemampuan untuk memahami, mempertimbangkan dan membedakan makna bermoral.

Keberanian Mengambil Keputusan, yaitu kemampuan untuk tidak ragu menentukan pilihan yang tepat saat mengalami dilema moral.

Pengenalan Diri (Self Knowledge), mampu mengetahui dan memahami perilaku sendiri serta dapat mengevaluasinya dengan jujur.

2. Perasaan Moral (Moral Feeling)

Perasaan moral adalah kemampuan untuk merasa harus selalu melakukan tindakan moral yang sesuai dengan norma dan merasa bersalah jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma (berbuat jahat). Perasaan ini juga terdiri dari enam komponen, yaitu:

Mendengarkan Hati Nurani, yaitu perasaan moral naf mendorong seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan hati nurani dalam sisi kognitif dan sisi emosional. Sepintar-pintarnya manusia, kelebihanannya adalah tetap memperhatikan emosi dan tidak buta terhadap sesuatu yang objektif jika dibandingkan dengan kecerdasan buatan.

Harga Diri (*self esteem*), yakni memiliki kesadaran untuk menjaga harkat dan martabat berdasarkan nilai yang luhur.

Empati, memiliki kepekaan (mampu turut merasakan) penderitaan orang lain.

Cinta Kebaikan, kemampuan untuk merasa suka dan senang ketika melakukan kebaikan.

Kontrol Diri, kemampuan untuk mengendalikan emosi berlebih, baik saat marah ataupun terlalu senang (euforia).

Rendah Hati (*humility*), berarti tidak merasakan rasa keunggulan yang berlebih, dapat tetap terbuka terhadap perbaikan kesalahan dan mengatasi rasa sombong namun tetap percaya diri.

3. Tindakan Moral

Mampu bergerak dan melakukan tindakan nyata moral yang sesuai dengan norma, hingga mencegah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kebaikan lingkungan. Tindakan moral terdiri menjadi tiga komponen utama, yakni:

Kompetensi (*competence*), merupakan kemampuan untuk mengubah perasaan moral menjadi tindakan moral yang efektif.

Keinginan (*will*), kemampuan untuk kuat dan bertahan melakukan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pengetahuan dan perasaan moral.

Kebiasaan, adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu secara konsisten dan berulang-ulang hingga telah terbiasa dan terasa lebih ringan untuk dilakukan secara terus-menerus.

2.1.2 Nilai-Nilai dan Tujuan Pendidikan Karakter

Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik-buruk yang diterima oleh masyarakat umum mengenai perbuatan, sikap, yang sesuai dengan nilai yang berbudi luhur. Berikut adalah 18 nilai-nilai karakter yang sesuai dengan pedoman Kemendiknas tahun 2010.

Nilai	Deskripsi
Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
Jujur	Perilaku yang selalu berupaya untuk menjadi orang yang sesuai dan menepati apa yang dilakukan baik dalam perkataan, tindakan, maupun pekerjaan.
Toleransi	Sikap dan perilaku yang menghargai perbedaan ras, agama, etnis, pendapat, tindakan yang berbeda.
Disiplin	Tindakan yang berperilaku tertib dan patuh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.
Kreatif	Berpikir dan bekerja dengan menghasilkan cara baru atau unik dari yang telah ada/dimiliki.
Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain saja.
Demokrasi	Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang mempertimbangkan hak dan kewajiban dirinya dan orang banyak.
Rasa Ingin Tahu	Selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dilihat, didengar dan dipelajari secara umum.
Semangat Kebangsaan	Berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas

	kepentingan diri dan kelompoknya.
Cinta Tanah Air	Berpikir, bersikap dan bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap segala aspek bangsa dan negara.
Menghargai Prestasi	Mampu mendorong diri untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui, serta menghargai keberhasilan orang lain.
Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang untuk bergaul, berbicara, dan bekerja sama dengan orang lain.
Cinta Damai	Perilaku, sikap, perkataan, dan tindakan yang membuat orang lain merasa senang dan damai atas kehadiran individu tersebut.
Gemar Membaca	Kebiasaan yang selalu memberikan waktu untuk membaca dan berbagi bacaan yang bermanfaat dan memberikan kebajikan bagi dirinya.
Peduli Lingkungan	Selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitarnya, termasuk menjaga, mencegah dan memperbaiki tatanan alam di sekitar.
Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin menolong dan membantu orang lain dan masyarakat umum yang membutuhkan.
Tanggung Jawab	Selalu melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban diri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan YME.

Sumber: Pedoman Sekolah Kemendiknas (2010:9)

Zubaedi (2012:177-183) menyebutkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendidikan karakter, yakni: (1) Faktor Insting (Naluri), Insting adalah sikap dan tabiat yang telah terbentuk sejak dilahirkan.; (2) Adat (Kebiasaan), Suatu perilaku yang sama dan diulang secara terus-menerus hingga menjadi terbiasa; (3) Keturunan (*heredity*), Sifat-sifat anak sebagian merupakan cerminan dari sikap dan sifat orangtuanya, baik secara rohani, maupun

jasmani; (4) Lingkungan (*milieu*), Segala hal yang mengelilinginya mulai dari adat istiadat, pergaulan, keadaan sekolah, desa, kota, dsb akan memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung pada karakter seseorang.

Tujuan pendidikan karakter menurut Mulyasa (2012:9) adalah untuk mendorong peserta didik agar mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, Kemdiknas menyatakan bahwa tujuan pendidikan karakter antara lain: (1) Mengembangkan potensi nurani/kalbu/afektif peserta didik sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, (2) Mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai universal dan tradisi bangsa yang religius, (3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa, (4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan, (5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan aman, jujur, kreatif dan bersahabat.

Fungsi pendidikan karakter menurut Zubaedi (2012, hlm. 18) dibagi menjadi tiga fungsi utama, yakni: (1) Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, dan berperilaku baik dan berbudi luhur; (2) Fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan

berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum, (3) Fungsi penyaring. Pendidikan karakter dapat digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri dan dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur.

2.1.3 Peran Pemerintah Dalam Pendidikan Karakter

Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam pengembangan pendidikan karena pemerintah sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Pemerintah sebagai komponen yang sangat penting dalam kegiatan untuk menunjang pembentukan karakter bangsa. Para aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan merupakan yang pengambil dan pelaksana kebijakan yang ikut dalam menentukan berhasilnya karakter bangsa, baik informal, formal, maupun non formal. Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan secara informal yang di lakukan di dalam kelas tetapi bisa dilakukan secara nonformal. Dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Kemendiknas 2010:15-17) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan. Masih dari Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Kemendiknas, agar pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara optimal, pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) Sosialisasi ke *stakeholders* (komite sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya), (2) Pengembangan dalam kegiatan sekolah, (3)

Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, (4) Pengembangan Budaya Sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar, melalui: (a) Kegiatan rutin, (b) Kegiatan spontan, (c) Keteladanan, (d) Pengondisian; (5) Kegiatan ekstra kurikuler, (6) Menanamkannya melalui kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.

Penguatan pendidikan karakter yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 sebagaimana berbunyi :

1. Penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21, yaitu: berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
2. Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru
3. Penguatan dan revitalisasi peran Kepala Sekolah sebagai manager dan guru sebagai inspirator PPK
4. Revitalisasi Komite Sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat
5. Diperkuatnya peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 (lima) hari
6. Sinergi antar Kementerian, Pemda, lembaga masyarakat, penggiat pendidikan dan sumber-sumber belajar lain

Pengorganisasian Gerakan PPK merupakan mekanisme koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem pendidikan yang terkait dengan penyelenggaraan PPK. Seluruh pelaku membentuk jejaring dan kolaborasi secara terintegrasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Gerakan PPK diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan

koordinasi sektoral antar kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan berperan menetapkan kebijakan gerakan PPK. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota memegang peranan penting dalam mendampingi, membina, dan mengarahkan satuan pendidikan dalam pelaksanaan PPK. Kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya pendidikan untuk melaksanakan PPK. PPK dapat dilaksanakan secara integratif dan kolaboratif.

Integratif adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan karakter dengan substansi mata pelajaran secara kontekstual. Kontekstual yang dimaksud dimulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan penilaian.

Kolaboratif adalah pembelajaran yang mengkolaborasikan dan memberdayakan berbagai potensi sebagai sumber belajar dan/ atau pelibatan masyarakat yang mendukung Penguatan Pendidikan Karakter..

Pelaksanaan gerakan PPK yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya sampai dengan satuan pendidikan dapat melibatkan berbagai pelaksana dan pemangku kepentingan pendidikan berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing. Fungsi dan peranan masing-masing pihak dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : (a). membuat peraturan tentang pelaksanaan gerakan PPK; (b). menyusun kebijakan pelaksanaan gerakan PPK;

- (c). melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan kementerian/lembaga terkait lainnya; (d). menyusun dan mengembangkan materi PPK; (e). melakukan sosialisasi dan menumbuhkan inisiasi pelaksanaan gerakan PPK; (f). melaksanakan pengembangan SDM PPK; (g) memberikan dukungan sarana dan prasarana program PPK; (h). memberikan pendampingan pelaksanaan program PPK; dan (i) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK.
2. Dinas Pendidikan Provinsi : (a). melaksanakan koordinasi implementasi pelaksanaan program PPK dengan dinas pendidikan kabupaten/kota; (b). melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan dinas terkait di tingkat provinsi; (c). memberikan dukungan pelaksanaan program PPK; (d). memberikan pendampingan pelaksanaan program PPK; dan (e). melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (a). melaksanakan koordinasi implementasi pelaksanaan program PPK dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan pendidikan; (b). melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota; (c). memberikan dukungan pelaksanaan program PPK pada satuan pendidikan; (d). memberikan dukungan sarana dan prasarana program PPK pada satuan pendidikan; (e). memberikan pendampingan pelaksanaan program PPK pada satuan pendidikan; dan (f). melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK di satuan pendidikan.

2.1.4. Efektivitas Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Menurut Ravianto (2014:11) pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Menurut Gibson (Bungkaes 2013:46), pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.

Sutrisno (2010 : 149) juga mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercapai efektivitas organisasi baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Produksi (production). Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya. Ukuran produksi ini akan meliputi

keuntungan penjualan, jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan sebagainya.

- b. Efisiensi (*efficiency*). Ini berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan. Agar organisasi bisa bertahan perlu memperhatikan efisiensi. Ukuran efisiensi melibatkan tingkat laba, modal atau harta, biaya per unit, penyusutan, depresiasi dan sebagainya.
- c. Kepuasan (*satisfaction*). Banyak manajer berorientasi pada sikap untuk dapat menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, sehingga mereka dapat merasakan kepuasannya dalam bekerja. Hal ini dilakukan manajer dengan pencarian keuntungan yang optimal. Yang dimaksud optimal yaitu pencapaian tujuan yang diselaraskan dengan kondisi organisasi demi kelangsungan usahanya.
- d. Adaptasi (*adaptiveness*). Kemampuan adaptasi ialah sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan, kemampuan adaptasi ini sifatnya lebih abstrak di banding dengan masalah yang lain seperti produksi, keuangan, efisiensi, dan sebagainya. Walaupun demikian, tetapi bisa diamati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidup bisa terancam.
- e. Perkembangan (*development*). Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus (*survive*) dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. Usaha

pengembangan kemampuan tersebut seperti program pelatihan bagi karyawan. Dari pengembangan kemampuan organisasi diharapkan dapat mengembangkan organisasinya dengan baik untuk sekarang maupun yang akan datang.

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sebuah organisasi sangat perlu untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana langkah efisiensi dilakukan dalam organisasi tersebut. Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, namun banyak terdapat perbedaan dari para pakar yang menggunakannya. Sebab utamanya adalah tidak adanya kesamaan pendapat karena banyaknya ukuran efektivitas yang dapat digunakan.

Selain itu terdapat beberapa pengukuran efektivitas kebijakan publik. Bryant dan White dalam Samodra Wibawa, dkk (1994:65) mengusulkan beberapa kriteria selain tujuan dan target untuk dapat mengukur efektivitas implementasi program sebagai berikut :

- a. Waktu pencapaian.
- b. Tingkat pengaruh yang digunakan.
- c. Perubahan perilaku manusia.
- d. Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek.
- e. Tingkat kesadaran manusia akan kemampuan dirinya.

Menurut Nugroho (2012:107) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tepat Kebijakan. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan

tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat Pelaksanaan. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Tepat Target. Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Tepat Lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian

lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijaksanaan dan implementasi kebijakan; interpretive institution yang berkenaan dengan interpretasi lembaga lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; individuals, yakni individu individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Tepat Proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu : (1) *Policy acceptance*. Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; (2) *Policy adoption*. Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; (3) *Strategic readiness*. Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

Pengertian pendidikan memang sangat beragam. Tetapi yang jelas tujuan utama pendidikan adalah transformasi ilmu, kecakapan, dan nilai. Aziz (2011:72), bahwa pendidikan adalah proses transformasi-dialogis antara peserta didik dengan pendidik dalam semua potensi kemanusiaannya sehingga menumbuhkan kesadaran, sikap, dan tindakan kritisnya. Lepas dari beragam pengertian, makna

pendidikan adalah proses humanisasi (pemanusiaan) manusia. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hakikat indikator keberhasilan pendidikan sejatinya lebih dominan ke arah tersebut; Bahwa keberhasilan pendidikan diukur dengan moralitas atau akhlak para lulusannya, di samping tidak mengabaikan intelektual dan kecakapan hidup. Dengan kata lain, moralitas menjadi fondasi dasar dalam membengun manusia yang tangguh. Mulyasa (2013) menyebutkan sejumlah indikator keberhasilan program pendidikan karakter oleh peserta didik, diantaranya mencakup:

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja;
2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri;
3. Menunjukkan sikap percaya diri;
4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas;
5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional;
6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif;
7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif;

8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya;
9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari;
10. Mendeskripsikan gejala alam dan sosial;
11. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab;
12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
13. Menghargai karya seni dan budaya nasional;
14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya;
15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik;
16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun;
17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat;
18. Menghargai adanya perbedaan pendapat;
19. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana;
20. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana;
21. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah;

22. Memiliki jiwa kewirausahaan.

Wibowo (2011: 98) ada dua jenis indikator yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di sekolah yaitu sebagai berikut:

1. Indikator untuk sekolah dan kelas Indikator sekolah dan kelas adalah penanda yang digunakan oleh kepala sekolah, guru, dan personalia sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sekolah sebagai lembaga pelaksana pendidikan karakter. Indikator ini juga berkenaan dengan kegiatan sekolah yang diprogramkan, maupun kegiatan sehari-hari atau rutinitas sekolah.
2. Indikator mata pelajaran. Indikator ini menggambarkan perilaku apektif seorang peserta didik berkenaan dengan mata pelajaran tertentu. Indikator ini dirumuskan dalam bentuk perilaku peserta didik di kelas dan sekolah, yang dapat diamati melalui pengamatan guru ketika seorang peserta didik melakukan suatu tindakan di sekolah, tanya jawab dengan peserta didik, jawaban yang diberikan peserta didik terhadap tugas atau pertanyaan guru, dan tulisan peserta didik dalam laporan atau pekerjaan rumah PR.

Asmani (2011: 56) pada tataran sekolah, kriteria pencapaian pendidikan karakter adalah terbentuknya budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah harus berlandaskan nilai-nilai tersebut.

2.2 Kerangka Konseptual

Krisis karakter atau moralitas ditandai oleh meningkatnya kejahatan tindak kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), pornografi dan pornoaksi, serta pergaulan bebas yang sudah menjadi patologi dalam masyarakat. Adapun krisis moral lainnya yang sungguh nyata telah terjadi ialah perilaku korup yang telah mentradisi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, krisis kepercayaan pun terjadi pada kelompok elit masyarakat, yakni perilaku korup yang semakin mengkhawatirkan. Demoralisasi ini karena proses pembelajaran cenderung mengajarkan pendidikan moral dan budi pekerti sebatas tekstual semata dan kurang mempersiapkan pembelajar untuk menyikapi kehidupan yang kontradiktif tersebut. Menangani persoalan tersebut, maka implementasi pendidikan karakter menjadi suatu keniscayaan. Pendidikan karakter bukanlah suatu topik yang baru dalam pendidikan. Pada kenyataannya, pendidikan karakter ternyata sudah seumur dengan pendidikan itu sendiri. Berdasarkan penelitian sejarah dari seluruh negara yang ada di dunia ini, pada dasarnya pendidikan memiliki dua tujuan, yaitu membimbing para pembelajar untuk menjadi cerdas dan memiliki perilaku berbudi. Pendidikan karakter merupakan pengembangan kemampuan pada pembelajar untuk berperilaku baik yang ditandai dengan perbaikan berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan), dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Kemampuan yang perlu dikembangkan pada pembelajar adalah kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya, dan kemampuan untuk

menjadikan dunia ini sebagai wahana bagi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Sehingga, hakikat pendidikan karakter adalah proses bimbingan peserta didik agar terjadi perubahan perilaku, perubahan sikap, dan perubahan budaya, yang akhirnya kelak mewujudkan komunitas yang beradab.

Karakter merupakan suatu kumpulan karakteristik individu yang khas dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak dalam hidup, bergaul, bekerjasama, maupun memecahkan masalah di lingkungannya. Dengan pendidikan karakter, diharapkan siswa menampilkan karakter tertentu yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan karakter, khususnya yang bersifat sikap sebenarnya merupakan perwujudan dari kesadaran diri yang sebagian besar merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari manusia. Secara konseptual aspek sikap atau ranah afektif lebih efektif bila dilaksanakan melalui kegiatan sehari-hari. Misalnya sikap disiplin dan kemandirian siswa akan lebih mudah tertanam dan dikembangkan pada siswa bila hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan sehari-hari di sekolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Jl. Gunung Merapi No.1, Binjai Estate, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara. Adapun jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2021								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
1	Pengajuan judul									
2	Penulisan proposal									
3	Bimbingan proposal									
5	Seminar proposal									
6	Pengumpulan Data									
7	Analisis Data									
8	Penyusunan Laporan Tesis									
9	Laporan Tesis									

3.2 Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Binjai Jalan Jl. Gunung Merapi No.1, Binjai Estate, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara. Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan sebagai grand design yang dikembangkan Kemendiknas yang wajib dilaksanakan oleh Dinas-Dinas Pendidikan serta satuan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana pada tahun 2018 program penguatan pendidikan karakter telah dicanangkan dan dimplementasikan

oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai kepada sekolah-sekolah rintisan di lingkungan Dinas Pendidikan Binjai. Namun demikian kenyataannya, dalam perjalannya program penguatan pendidikan karakter yang di programkan oleh Dinas Pendidikan kota Binjai masih belum terselenggara dengan baik dan belum efektif.

3.3 Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena pada penelitian ini dijabarkan dan menggambarkan mengenai implementasi program penguatan pendidikan karakter Dinas Pendidikan Binjai. Penelitian ini rencananya dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Bulan Juni 2021. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan studi kasus. Sebagaimana pendapat Ulfatin (2013: 48) metode penyelidikan studi kasus dilakukan dalam latar yang alamiah dan memusatkan perhatian pada suatu peristiwa atau aktivitas secara intensif dan rinci. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang diteliti, sehingga sifat dari penelitian ini lebih banyak bersifat eksploratif dan deskriptif. Creswell (2014: 20) model studi kasus ini merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Peneliti memilih jenis penelitian studi kasus karena dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti sebuah aktivitas secara intensif dan rinci. Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahap-tahap

penelitian. Menurut Moleong (2012: 127-148), ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan penjajakan lapangan (*field study*) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data.

3. Tahap analisis data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data yang diperbandingkan dengan teori kepustakaan.

4. Tahap evaluasi dan pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.

3.4 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yakni data primer dan skunder. Data primer bersumber dari Pejabat Dinas Pendidikan kota Binjai yang bertanggungjawab dalam program penguatan pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan, kepala Sekolah, pengawas dan guru di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan data skunder bersumber dari dokumen-dokumen yang diperoleh dilapangan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menghasilkan informasi dan data-data lapangan tentang implementasi program penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Binjai pada satuan pendidikan dasar negeri, yakni .

Tabel 3.1 Gambaran Responden Penelitian

Sumber Data	Instansi	Jumlah	Sumber Data
UPDT	Dinas Pendidikan	2	Wawancara
Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan	1	Wawancara
Kepala Sekolah	SD Negeri 024772	1	Wawancara
	SD Negeri 024184	1	Wawancara
	SD Negeri 024183	1	Wawancara
Guru	SD Negeri 026147	12	Survei
	SD Negeri 023900	10	Survei
	SD Negeri 020259	8	Survei
Siswa	SD Negeri 024772	1	Angket
	SD Negeri 023900	1	Angket

3.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Adapun teknik dan prosedur pengumpulan datanya sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka dan tertutup. (Ulfatin, 2013: 48) wawancara terbuka yakni wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pertanyaan terbuka (bebas) kepada informan. Pertanyaan wawancara dikembangkan berdasarkan item-item pertanyaan yang sifatnya terbuka yang akan diajukan oleh peneliti secara spontan dan kondisional. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pertanyaan dalam menggali data berdasarkan indikator dari teori yang dirumuskan dalam fokus penelitian. Pertanyaan penelitian dirancang dalam dua pendekatan yakni pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup.

Tabel 3.1 : Lembar Pertanyaan Terbuka dan Tertutup

No	ASPEK YANG DIPERTANYAKAN	SKOR
1	Kebijakan program penguatan pendidikan karakter sudah dirumuskan sesuai dengan karakter yang diharapkan	1 2 3 4 5
2	Kebijakan program penguatan pendidikan karakter bersifat memberdayakan masyarakat dalam hal ini sekolah-sekolah	1 2 3 4 5
3	Kebijakan program penguatan pendidikan karakter sesuai dengan apa yang telah direncanakan	1 2 3 4 5
4	Sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai model pendidikan karakter berbabsis kearifan lokal melaksanakan pendidikan karakter berbabsis kearifan lokal dengan baik	1 2 3 4 5
5	Pelaksana kegiatan dalam hal ini sekolah memahami, bahwa kebijakan pendidikan karakter bersifat sebagai program yang diperlukan untuk masa depan pendidikan karakter	1 2 3 4 5

6	Sekolah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan	1	2	3	4	5
7	Sekolah telah ikutserta dan menjadi bagian dari dari pengambil kebijakan program pendidikan karakter berbabsis kearifan lokal	1	2	3	4	5

SKOR TOTAL

$$Nilai = \frac{SKOR\ TOTAL}{35} \times 100$$

2. Observasi (*observation*)

Hadi (2002:21) mengatakan bahwa observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek dan fenomena yang diteliti secara objektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih kongkrit. Sedangkan menurut Menurut Wahyudin, dkk (2006:25) observasi adalah sebagai alat penilaian baik yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau terjadinya suatu proses kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi di lokasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan sistematis terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi umum.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Lincoln dan Guba (dalam Sugiyono, 2015: 83) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi accounting. Teknik

ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Hasil penelitian juga akan semakin dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Peneliti menggunakan teknik ini karena teknik ini selalu tersedia dan murah, dalam dokumentasi terdapat informasi yang stabil baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi di masa lampau maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan. Dokumentasi merupakan sumber informasi yang kaya secara kontekstual dan relevan dalam konteksnya. Sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi akuntabilitas dan juga nonreaktif.

3.6 Prosedur Analisis Data

Penelitian ini juga diarahkan untuk menghimpun data baik data kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya mengambil makna, dan pemahaman dari sebuah kasus. Peneliti juga akan mengamati secara berkala terhadap fenomena-fenomena yang terjadi terkait fokus penelitian ini baik yang tampak dari situasi serta kondisi objek penelitian yang informasinya dapat diperoleh dari berbagai informan dan dokumen pendukung lainnya.

Untuk pendekatan kualitatif peneliti akan mengikuti model Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data. Data-data yang dianalisis melalui beberapa tahapan-tahapan, sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:337) analisis data kualitatif terdiri dari *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang telah dilakukan, yaitu penggabungan dari berbagai jenis teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus. Pengumpulan data akan peneliti lakukan sepanjang data masih diperlukan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.

Data yang sudah dipilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Semua data itu dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang telah terkumpul dan mengambil data-data yang

penting dan pokok serta membuang data yang tidak diperlukan supaya tidak tercampur dengan data yang pokok.

Semua data yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi akan dikaitkan satu sama lain. Kemudian peneliti menganalisa dan memilah lagi data yang ada relevansinya dengan fokus penelitian untuk dijadikan lebih sederhana, demikian juga dengan data-data yang lain. Data yang telah direduksi akan dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan dimensi permasalahan yang akan dicari jawabannya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, tahap berikutnya adalah tahap penyajian data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *chart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data dalam bentuk *display*, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

Menurut Miles dan Huberman dalam Imam Suparyogo dan Tobroni mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti melakukan display data dalam penelitian ini dengan penyajian data melalui ringkasan-ringkasan penting

dari data yang telah direduksi. Data yang terpilih kemudian disajikan oleh peneliti.

Setelah mendapatkan hasil reduksi data dari berbagai komponen permasalahan penelitian yang diangkat, maka dilakukan penyimpulan sementara untuk menggambarkan tentang permasalahan penelitian.

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang terpercaya (*credible*). Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data dengan data yang valid dan berkualitas sebagaimana adanya, sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan juga memiliki kualitas tinggi dan baik. Apapun kesimpulan yang didapat, apakah kesimpulannya menjawab fokus penelitian awal atau tidak merupakan hal yang biasa, karena penelitian kualitatif lebih bersifat dinamis dan tidak statis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Dinas Pendidikan untuk wilayah Kota Binjai, Sumatera Utara merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Kota Binjai bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh Walikota / Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui kantor dinas pendidikan ini, pemerintah daerah bidang pendidikan melakukan tugasnya pada wilayah kerjanya. Tugas tersebut mencakup pembantuan urusan pendudukan, pengawasan, penyusunan program pendidikan daerahnya, menyusun strategi, perumusan kebijakan pendidikan, hingga memberikan layanan umum dalam hal pendidikan. Dinas pendidikan ini juga menjadi pembina dan pemberi izin sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga lembaga bimbingan belajar. Segera kunjungi kantor dinas pendidikan terdekat ini atau juga dapat mengakses secara online website dinas pendidikan untuk mendapatkan informasi lainnya. Alamat lokasi: Jl. Gn. Merapi No.1, Binjai Estate, Binjai Selatan Kota Binjai, Sumatera Utara 20714, Indonesia. Nomor telepon: (061) 8821792.

Binjai adalah salah satu kota dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibukota provinsi Sumatera Utara, Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari provinsi Aceh. Binjai sejak lama dijuluki sebagai kota rambutan karena rambutan Binjai memang sangat terkenal. Bibit rambutan asal Binjai ini telah tersebar dan dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Blitar, Jawa Timur menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Sampai saat ini, jumlah sekolah umum yang terdaftar di Pemerintah Dati II Binjai adalah 154 SD, 37 SMP, 9 MT, 31 SMU dan 10 MA, keseluruhan berjumlah 241 buah. Jumlah penduduk usia sekolah wajib di bawah 19 tahun adalah 78.000 jiwa. Dari total jumlah 241 buah sekolah ini, 85 sekolah di antaranya terletak di Binjai Utara. Salah satu sekolah yang terkenal adalah Sekolah Swasta Methodist Binjai yang masuk dalam 40 sekolah unggulan menurut majalah GATRA dengan judul 40+ Sekolah Unggulan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional.

a. Dinas Pendidikan Kota Binjai

Dinas Pendidikan Kota Binjai terletak di jalan Gunung Merapi, No.1 Binjai. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Universitas Sumatera Utara Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Binjai bahwa Dinas Pendidikan Kota Binjai merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu pada bidang pendidikan dan pengajaran di Kota Binjai. Dinas Pendidikan Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai. Dinas ini melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Pendidikan Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut: a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan. b. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendidikan. c. membina dan melaksanakan tugas di bidang pendidikan. d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai menerangkan bahwa susunan organisasi terdiri dari :

1. **Kepala Dinas.** Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan.
2. **Sekretariat.** Sekretaris mempunyai tugas : - menyusun rencana, program dan kegiatan kesekretariatan. - mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program Dinas. Universitas Sumatera Utara - melaksanakan dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, keuangan, program dan perbendaharaan serta laporan keuangan Dinas. - mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang dinas, inventaris barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan. - menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah LAKIP. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi :

- menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- menyusun bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
- mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, inventaris barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan.
- mengelola administrasi kepegawaian.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :

- menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- menyusun bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.
- melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
- menyusun dan mengajukan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja lainnya.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Program, mempunyai fungsi:

- menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- menyusun bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana program.
- menyiapkan bahan penyusunan rencanan dan program.
- mengolah data sistem pendidikan.
- melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sekolah.
- menyusun profil pendidikan.
- mengelola program bantuan sekolah.
- menghimpun hasil perencanaan dan program masing-masing bidang.

Universitas Sumatera Utara

- membantu Sekretaris dalam rangka mengumpulkan dan menyusun data untuk bahan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra-SKPD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP. - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan khusus.** Bidang Pendidikan Dasar dan pendidikan khusus dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang pendidikan dasar dan pendidikan khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan pendidikan khusus mempunyai fungsi sebagai berikut : - menyusun program dan rencana kerja. - melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan khusus. - melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan khusus. - melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. - melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. - melakukan pengawasan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. - merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan pendidikan khusus. - melaksanakan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan dasar dan pendidikan khusus, yang dikoordinasikan kepada Sekretaris oleh Kepala Dinas. - melaksanakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pendidikan dasar dan pendidikan khusus yang di koordinasikan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas. - merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan,

penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan pendidikan khusus. - melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik dasar dan pendidik menengah. - membawa pelaksanaan ujian nasional dan ujian khusus sekolah pendidikan dasar dan pendidikan khusus. - menyusun dan melaksanakan penilaian hasil pendidikan. - melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah. - menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah. Universitas Sumatera Utara - melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. - melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dan penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. - melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan penjaminan mutu. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan khusus dibantu oleh: a. Seksi Pendidikan SDPK dan Paket A, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan SDPK dan Paket A. - membantu pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir sekolah pendidikan SDPK dan Paket A - melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah. - menyusun jadwal kalender pendidikan SDSDLB dan Paket A. - meneliti kesesuaian buku mata pelajaran. - memproses rekomendasi mutasi siswa SDSDLB berprestasi. - melaksanakan program kerja sama antar sekolah. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi Pendidikan SMPPK dan Paket B, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan

kurikulum tingkat satuan pendidikan SMPPK dan Paket B. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. c. Seksi Ketenagaan SDSMP dan PK, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - memberikan pelayanan administratif terhadap guru SDSDLBSMPSMPLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - memproses mutasi guru SDSDLBSMPSMPLB yang telah dikoordinasikan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas. Universitas Sumatera Utara - menyusun dan menetapkan pola pembinaan guru SDSDLBSMPSMPLB. - merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas guru SDSDLBSMPSMPLB. - memproses usul kenaikan pangkat guru dan pengawas SDSDLBSMPSMPLB. - memproses dan merencanakan sertifikasi guru SDSDLBSMPSMPLB. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. **Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan.** Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang pendidikan menengah dan kejuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pendidikan menengah dan kejuruan. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai fungsi sebagai berikut: - menyusun program dan rencana kerja. - melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah kejuruan. - melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan tenaga kependidikan pendidikan menengah. - merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah. - melaksanakan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga pendidikan PNS untuk pendidikan menengah yang dikoordinasikan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas. - melaksanakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pendidikan menengah yang di koordinasikan

kepada Sekretaris dan Kepala Dinas. - merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga pendidik menengah dan kejuruan. - melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan menengah dan kejuruan. - membantu pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir sekolah pendidikan menengah dan kejuruan. - menyusun dan melaksanakan penilaian hasil pendidikan. - melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah. - menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah. - melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah dan kejuruan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. - melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah dan kejuruan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. - melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidik berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. Universitas Sumatera Utara - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan dibantu oleh: a. Seksi Pendidikan SMA dan Paket C, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum. - membantu pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir sekolah pendidikan SMA dan Paket C. - melaksanakan kurikulum nasional SMA dan Paket C. - menyusun dan melaksanakan penilaian proses pembelajaran. - koordinasi, fasulitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah. - menyusun jadwal kalender pendidikan SMA dan Paket C. - meneliti kesesuaian buku mata pelajaran. - memproses rekomendasi mutasi siswa SMA dan Paket C. - merencanakan program siswa SMA dan Paket C berprestasi. - melaksanakan program kerja sama antar sekolah. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya. b. Seksi Pendidikan Kejuruan, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - melaksanakan kurikulum nasional SMK. - menyusun dan melaksanakan penilaian proses pembelajaran. - menyusun jadwal kalender pendidikan SMK. - meneliti kesesuaian buku mata pelajaran. - memproses rekomendasi mutasi siswa SMK. - merencanakan program siswa SMK berprestasi. - merencanakan program kerjasama antar sekolah. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. c. Seksi Ketenagaan SMASMK, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - memberikan pelayanan administrasi terhadap guru SMASMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - melaksanakan seleksi guru SMASMK yang berprestasi. Universitas Sumatera Utara - memproses mutasi guru SMASMK yang dikoordinasikan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas. - menyusun dan menetapkan pola pembinaan guru SMASMK. - melaksanakan perencanaan upaya peningkatan kualitas guru SMASMK. - memproses usul kenaikan pangkat guru dan pengawas SMASMK. - memproses perencanaan sertifikasi guru SMASMK. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. **Bidang Sarana dan Prasarana.** Bidang sarana dan prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang sarana dan prasarana. Kepala bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut: - menyusun program dan rencana kerja. - menyusun rencana perlengkapan sarana dan prasarana TKSDSMPSMASMK dan pembangunan infrastruktur. - melakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. - mendistribusikan prasarana kantor, alat-alat pelajaran sekolah, buku pelajaran dan buku perpustakaan sekolah. -

melakukan pengadaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah. - pengadaan buku raport, blanko Surat Tanda Tamat Belajar STTB dan Nilai Ebtanas Murni NEM. - membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal. - memberikan izin pendirian serta mencabut izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. - menyelenggarakan dan atau mengelola pendidik berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh:

a. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - melaksanakan perlengkapan sarana dan prasarana TKSDSMPSMA dan pembangunan infrastruktur. Universitas Sumatera Utara - melaksanakan pengawasan terhadap pengguna sarana dan prasarana pendidikan. - melaksanakan pendistribusian prasarana kantor, alat-alat pelajaran sekolah, buku pelajaran dan perpustakaan sekolah. - melakukan pengadaan buku raport, blanko Surat Tanda Tamat Belajar STTB dan Nilai Ebtanas Murni NEM. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Akreditasi SDSMPSMASMK, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - menghimpun usulan akreditasi pendidikan nonformal. - membuat laporan dari hasil data usulan akreditasi pendidikan nonformal. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Perizinan Sekolah Kursus PAUD, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - memberikan izin pendidikan dan kursus kepada sekolah kursus PAUD. - memberikan izin pendirian dan penutup satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. - memberikan

rekomendasi penyelenggaraan PAUD. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. **Bidang Pendidikan Nonformal.** Bidang Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pendidikan nonformal. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi sebagai berikut: - menyusun program dan rencana kerja. - merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan nonformal. - memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan nonformal. - melaksanakan sosialisasi kepada tenaga teknis pendidikan nonformal, lembaga pendidikan anak usia dini dan TK. Universitas Sumatera Utara - melakukan pengawasan program khusus dan memberikan pembinaan teknis kepada lembaga pendidikan dan kursus. - mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk mengelola lembaga pendidikan dan kursus serta melaksanakan inovasi. - melaksanakan pendidikan dan pelatihanpenataran guru pendidik nonformal. - melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan nonformal. - membuat petunjuk pelaksanaan penilaian belajar pendidikan nonformal, evaluasi akhir belajar pendidikan nonformal serta melaksanakan program kerja sama luar negeri di bidang pendidikan nonformal. - memindahkan tenaga pendidikan nonformal yang dikoordinasikan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas. - merencanakan pengadaan tempat belajar dan fasilitas. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dibantu oleh: a. Seksi Pembinaan PAUD dan TK, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - melaksanakan sosialisasi kepada pendidikan anak usia dini dan TK tentang teknis

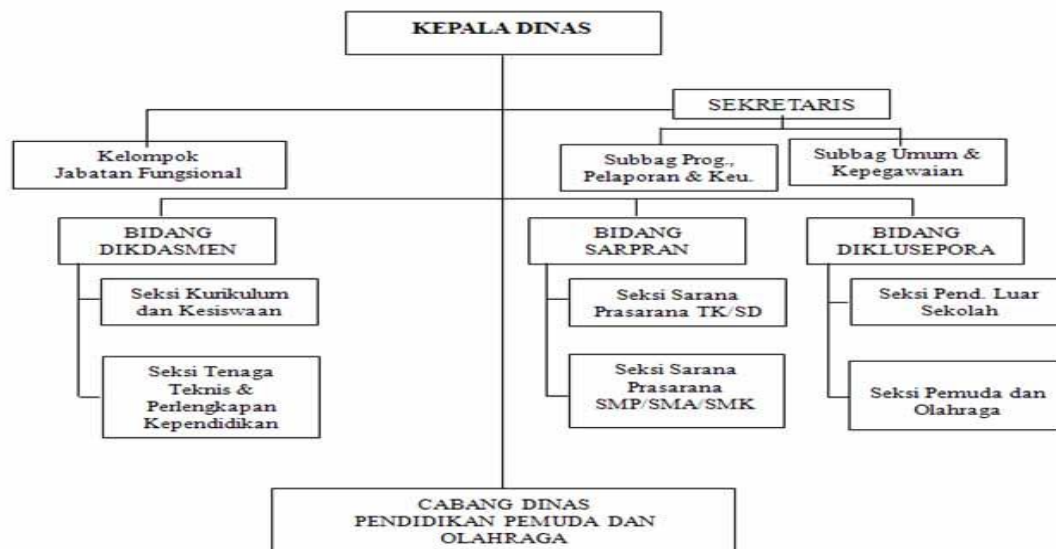
penyelenggaraan lembaga kegiatan dan pengembangan PAUD dan TK. - melaksanakan pendataan lembaga PAUD dan TK. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi Pembinaan Kursus, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kursus, petunjuk teknis penyelenggaraan kursus. - melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kursus model program kerja serta memberikan bimbinganpembinaan kepada teknis kursus. - mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk mengelola lembaga pendidikan dan kursus dan melaksanakan inovasi. - melaksanakan pendataan lembaga kursus. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Universitas Sumatera Utara c.Seksi Ketenagaan PAUDTK dan Kursus, mempunyai fungsi: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - melaksanakan pendidikan dan pelatihanpenataran terhadap guru PAUDTK dan kursus. - membuat petunjuk pelaksanaan penilaian belajar pendidik nonformal, evaluasi akhir belajar pendidikan nonformal serta melaksanakan program kerja sama luar negeri di bidang pendidikan nonformal. - melaksanakan mutasi tenaga pendidikan nonformal yang dikoordinasikan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas. - pengadaan bahan belajar dan fasilitas lainnya. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

7. **Unit Pelaksanaan Teknis Dinas UPTD Cabang Dinas Pendidikan.** UPTD Cabang Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD cabang Dinas Pendidikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di Kecamatan. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan mempunyai fungsi: - menghimpun dan mengelola data sekolah laporan

bulanan dan meneruskannya ke Dinas Pendidikan Kota Binjai. - menyusun daftar tunggu kenaikan gaji berkala gurupegawai. - menerima dan meneruskan usul kenaikan pangkatgolongan, usul pensiun. - menyalurkan gajitunjangan dan dana lainnya serta bertanggung jawab dalam pengumpulan SPJ. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk kelancaran tugas Kepala UPTD cabang Dinas Pendidikan dibantu oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas: - menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. - menyelenggarakan penegakan disiplin pegawai. - melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai, mengusulkan usulan naik pangkat. - mengusulkan urusan perpindahan, mutasi dan pensiun di lingkungan Cabang Dinas. - membuat laporan secara berkala dan mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan kepada Kepala UPTD Cabang Dinas. Universitas Sumatera Utara - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pada Dinas Pendidikan Kota Binjai dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. 2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Binjai

c. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Binjai

Visi yaitu :

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia SDM Yang Bermutu, Berakhlak Mulia, Maju Dan Sejahtera Melalui Pendidikan.”

Misi yaitu :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Bermutu Untuk Mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 sembilan Tahun Yang Demokratis.
2. Peningkatan Manajemen Profesionalisme, Sertifikasi, Penetaraan dan Penambahan Guru Tenaga Kependidikan.
3. Peningkatan Mutu Pendidikan, Kreatifitas, Nilai Akademik dan Lulusan yang Berakhlak Mulia.
4. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

4.2 Temuan Khusus Penelitian

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

4.2.1 Deskripsi Data Kualitatif

Penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh tingkat satuan pendidikan sekolah dasar di kota Binjai, meliputi aspek (1) implementasi kordinasi dengan satuan pendidikan; (2) implementasi dukungan pelaksanaan program pada satuan pendidikan; (3) implemenasi dukungan sarana dan prasarana program pada satuan pendidikan; (4) implementasi pendampingan pelaksanaan program pada satuan pendidikan; dan (5) implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di satuan pendidikan. Berikut paparan temuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Implementasi kordinasi dengan satuan pendidikan

Sebuah lembaga tentunya membutuhkan suatu organisasi agar lebih terkoodinasikan dengan baik, hal tersebut guna mempermudah lembaga dalam melaksanakan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam implementasi program penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan dasar, dalam hal ini UPDT Dinas Pendidikan Kota Binjai melakukan kordinasi dengan Kepala sekolah-Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab kegiatan disatuan pendidikan dasar, dibantu oleh tim pengembang sekolah dan juga para koordinator lainnya yaknu pelaksana UPDT. Ada pun koordinator ditingkat satuan pendidikan dasar negeri tersebut adalah koordinator kesiswaan, koordinator

sarana dan prasarana, koordinator hubungan sekolah dengan masyarakat, dan lain-lain.

Hasil penelusuran dan pengamatan dilapangan ditemukan bahwa pelaksanaan kordinasi dalam program penguatan pendidikan karakter yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai yakni melakukan kordinasi dengan satuan pendidikan yakni melalui Kepala Sekolah di sekolah-sekolah dasar rintisan. Adapun kordinasi program penguatan pendidikan karakter sebagai berikut: (1) kepala sekolah, sebagai penanggungjawab kegiatan, dan kebijakan sekolah, (2) tim pengembang sekolah, yang terdiri dari koordinator kurikulum dan pengembang mutu sekolah, yaitu membantu kepala sekolah dalam mengawasi, membuat program kerja, dan membantu berjalannya program kegiatan, (3) koordinator sekolah, turut membantu tim pengembang sekolah. Temuan-temuan penelitian dilapangan juga menunjukkan pelaksanaan kordinasi program penguatan pendidikan kerakter, sebagaimana hasil wawancara dengan pelaksana UPDT Dinas Pendidikan Binjai yakni Bapak Zaini ,M.Pd sebagai berikut :

Kordinasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan pendidikan karakter di SD Negeri rintisan dilaksanakan melalui sistem kordinasi dan melalui rapat formal yang diselenggarakan oleh Dinas dengan mengundang sekolah. Rapat melibatkan kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah. Untuk kebijakan pendidikan masing-masing tingkat disusun berdasarkan hasil rapat bersama. Formula kebijakan dalam pendidikan karakter dirumuskan bersama antara dinas, kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah. Kordinasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode baik argumentasi, rapat dan analisis

tertentu dalam upaya memperoleh suatu keyakinan bahwa pilihan kebijakan lebih baik dari yang lain...estimasi hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan sederhana yaitu dengan teknik brainstorming dan forum discussion group. (Wawancara, 12 April 2021, Pukul 10.00 wib).

Lebih lanjut, menurut pelaksana UPDT Dinas Pendidikan Binjai yakni Zaini, M.Pd menjelaskan :

Secara teknis, Dinas melakukan koordinasi program kegiatan pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan termasuk koordinasi dengan unit-unit utama. Dinas juga mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum yang sudah ada dengan kegiatan-kegiatan penguatan pendidikan karakter dan penyusunan buku panduannya. Ada beberapa strategi yang dilakukan Dinas untuk penguatan pelaksanaan pendidikan karakter, di sekolah dasar yaitu dengan memperkuat panduan bagaimana melaksanakannya (pendidikan karakter), lalu mengakomodasi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan pendidikan karakter walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Ketiga, menguatkan kegiatan yang sudah ada di sekolah, disamping Dinas tetap melakukan koordinasi menyeluruh dengan para Kepala Sekolah dan Pengawas. (Wawancara, 12 April 2021, Pukul 10.00 wib)

Hal senada juga disampaikan oleh Pengawas sekolah dasar dilingkungan Dinas pendidikan kota Binjai, yakni Sumarni S.Pd, MM menjelaskan bahwa :

Sejak tahun 2017 bahwa Dinas pendidikan kota Binjai sudah melaksnaakan berbagai kebijakan dan program kegiatan-kegiatan yang dilakukan

unit-unit utama untuk pelaksanaan pendidikan karakter pada umumnya mereka (Dinas) lebih banyak menyosialisasikan dokumen-dokumen pendidikan karakter dan bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter itu dalam kurikulum di sekolah-sekolah rintisan di Kota Binjai . Kordinasi dan pengawasan oleh kami selaku pengawas sekolah, hampir 100 persen sekolah dasar rintisan sudah mengetahui pentingnya penerapan pendidikan karakter. Artinya, sosialisasi dan kordinasi yang dilakukan oleh Dinas sudah berhasil. Keberhasilan itu juga didukung oleh unit-unit utama yang disetiap kegiatan mereka yang melibatkan banyak peserta dari seluruh sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan kota Binjai seperti pelatihan atau sosialisasi hal lainnya, selalu menyisipkan waktu untuk sosialisasi pendidikan karakter. Jadi, sosialisasi pendidikan karakter sudah cukup masif. (Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib).

Demikian halnya wawancara peneliti dengan kepala sekolah dasar negeri 024184 yakni Milayanti, S.Pd, menjelaskan bahwa :

Kordinasi yang dilakukan Dinas pendidikan kota Binjai dalam implementasi pendidikan karakter melalui berbagai pertemuan dan rapat, baik pertemuan di sekolah maupun di kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai . Kebijakan sekolah melaksanakan pendidikan karakter dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum, artinya tidak ada penambahan mata pelajaran bagi semua guru, kepala sekolah maupun tenaga pendidikan yang lain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah masing-masing. Jadi, nilai-nilai dalam pendidikan karakter diintegrasikan dalam mata

pelajaran atau pembiasaan-pembiasaan dengan beragam cara yang tepat disekolah.
(Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib).

Demikian halnya wawancara peneliti dengan kepala sekolah dasar negeri 024183 yakni Swarti,M.Pd menjelaskan bahwa :

Kordinasi kegiatan pendidikan karakter sebagai realisasi dari kebijakan pendidikan karakter antara lain melalui pertemuan dan rapat antara Dinas dan Kepala Sekolah di setiap kordinasi kegiatan ditujukan untuk membangun kesamaan dan kesepakatan tentang kebijakan yang akan dilaksanakan.
(Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib)

Berdasarkan berbagai hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa implementasi program pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan dasar di kota Binjai telah dilaksanakan kordinasi, kordinasi yang dilakukan melalui (1) pertemuan dan (2) rapat-rapat. Koordinasi melalui rapat dan pertemuan dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) baik di unit Dinas Pendidikan atau di satuan pendidikan dasar, sehingga setiap unit bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh program pendidikan karakter yang telah direncanakan. Dalam implementasi program pendidikan karakter terdapat beberapa kordinasi yang dilaksanakan dan dukungan struktur organisasi artinya 1) secara formal ada pembagian kerja untuk mencapai tujuan, pembagian kerja dilakukan secara informal, 2) pengelompokan pekerjaan dilakukan secara sederhana dimana pekerjaan dikelompokkan sebagai pekerjaan pengelolaan dan

pembinaan/pengawasan kegiatan. Fungsi pengelolaan dilakukan oleh guru dan fungsi pengawasan serta pembinaan dilakukan oleh kepala sekolah, 3) hubungan antar bagian yang menjelaskan rantai komando hanya dari kepala sekolah kepada guru termasuk pengelola kegiatan ekstrakurikuler serta tanggungjawab guru hanya kepada kepala sekolah, 4) Koordinasi setelah pekerjaan dibagikan dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pendidikan karakter agar tujuan tercapai.

2. Implementasi dukungan dalam pelaksanaan program pada satuan pendidikan

Beberapa bentuk dukungan yang diberikan pemerintah melalui Dinas Pendidikan kota Binjai kepada sekolah adalah pengalokasian anggaran, pedoman kurikulum pendidikan karakter, serta sosialisasi atau pelatihan. Semua pernyataan hasil wawancara mengenai dukungan pemerintah dalam proses implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar menjelaskan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang telah diberikan Dinas Pendidikan kota Binjai selama ini dirasa masih kurang. Bentuk dukungan yang paling diperlukan sekolah adalah pelatihan dan petunjuk teknis yang jelas dan ini masih dinilai kurang. Berikut beberapa hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah diuraikan sebagai berikut:

Temuan penelitian hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah dasar negeri 026147 yakni Elpiyanti, S.Pdi, menjelaskan bahwa :

Implementasi pendidikan karakter masih lemah dalam hal pelaksanaan teknis dilapangan hal ini dikarenakan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada

kami masih belum cukup. Pelatihan yang diberikan masih bersifat sosialisasi dan belum bersifat teknis pelaksanaan. Semua sekolah subjek pelatihan belum memiliki dokumen teknis bagaimana implementasi dan indikator ketercapaiannya sehingga tidak ada dasar untuk sekolah dapat mengukur keberhasilan program pendidikan karakter, namun sekolah dihimbau untuk merumuskan nilai-nilai karakter berdasarkan pencapaian indikator nilai yang dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini, jelas bahwa administrasi yang memuat laporan nilai karakter masih bersifat kinerja siswa di kelas dan belum mencerminkan program pendidikan karakter yang dicanangkan oleh dinas kepada sekolah. (Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib).

Temuan penelitian hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah dasar negeri 023900 yakni Eni Singarimbun, S.Pd., menjelaskan bahwa :

Selama ini dukungan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai dalam implementasi pendidikan karakter yakni dukungan anggaran. Sekolah-sekolah rintisan mendapatkan bantuan anggaran dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang diberikan melalui dana penguatan sekolah oleh Dinas. Selain itu dukungan diberikan pelatihan tentang implementasi pendidikan karakter, pelatihan ini kami dapat sebanyak 2 kali yang diselenggarakan di Dinas Pendidikan dan ini masih belum cukup bagi sekolah...sehingga terdapat kendala-kendala bagi sekolah dengan pelaksanaannya yang masih belum optimal, agar setiap penyelenggaraan pendidikan karakter berjalan efektif, maka sekolah perlu didukung oleh pelatihan-pelatihan yang lebih intensif mengingat sekolah-sekolah masih belum banyak yang memahami secara utuh implementasi pendidikan

karakter, selain itu pendidikan karakter di sekolah perlu dilakukan dengan membangun hubungan kemitraan dengan keluarga. Tujuannya adalah membangun sinergi dengan melibatkan orang tua atau keluarga dalam menanamkan pembiasaan karakter pada anak di lingkungan rumah dan sekitarnya, ini tentunya memerlukan sosialisasi antara sekolah dengan orang tua dan perlu adanya pelatihan bagi sekolah bagaimana mensinergikan program dengan orang tua. (Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib).

Temuan penelitian hasil wawancara peneliti juga didukung oleh pengawas sekolah dasar di lingkungan Dinas pendidikan kota Binjai, yakni Sumarni, S.Pd MM menjelaskan bahwa :

Implementasi pendidikan karakter di sekolah harus didukung oleh berbagai kegiatan pelatihan atau workshop selama ini kendala utama yang dialami oleh sekolah; yakni pelatihan kepada kepala sekolah dan guru mengenai pendidikan karakter masih dirasa kurang sehingga banyak kepala sekolah dan guru yang belum sepenuhnya memahami konsep pendidikan karakter di sekolah...semua kepala sekolah yang pernah saya temui menyatakan bahwa pelatihan pendidikan karakter masih belum optimal bagi sekolah dalam mengimplementasikan program pendidikan karakter. (Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib)

Berdasarkan hasil temuan wawancara di atas, bahwa Dinas Pendidikan kota Binjai dalam implementasi program pendidikan karakter di sekolah dasar negeri memberikan berbagai dukungan dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter meliputi; (1) membuat edaran tertulis kepada UPTD

mengenai kebijakan pendidikan karakter; (2) memberikan sosialisasi pada sekolah-sekolah, baik dengan anggaran pemerintah kota Binjai sendiri maupun sebagai pelaksana program pemerintah pusat; (3) hadir dalam uji publik kurikulum sekolah untuk melihat sampai sejauh mana itu pendidikan karakter sudah termuat dalam kurikulum sekolah; dan (4) pendampingan ke sekolah, meskipun tidak secara khusus untuk pendidikan karakter tetapi peningkatan mutu sekolah secara umum, (5) memberikan pelatihan meskipun masih dinilai belum maksimal.

3. Dukungan sarana dan prasarana

Hasil dari pendidikan karakter tidak dapat dirasakan atau dilihat seketika, karena hal ini memerlukan waktu lama. Penerapan pendidikan karakter memerlukan kerja sama berbagai pihak dalam hal ini dukungan sarana dan prasarana. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, terkhusus dalam mendukung program pendidikan karakter seperti: ruang perpustakaan, ruangan baca atau belajar, alat-alat atau media pendidikan, buku-buku bacaan dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas atau prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan karakter, seperti: ruangan shalat, kebun atau taman sekolah atau lainnya. Berikut hasil wawancara dengan para responden terkait dukungan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan

oleh Dinas Pendidikan dalam menunjang keberhasilan implementasi pendidikan karakter.

Hasil wawancara dengan UPDT Dinas Pendidikan kota Binjai yakni Zaini ,S.Pd sebagai berikut :

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan program pendidikan terutama dalam pendidikan karakter...dukungan yang diberikan Dinas kepada sekolah berupa sarana buku-buku pelajaran dan buku pedoman pelaksanaan pendidikan karakter bagi sekolah...selain itu sejumlah bantuan seperti komputer kepada sekolah rintiasan. (Wawancara, 12 April 2021, Pukul 10.00 wib).

Hasil wawancara dengan UPDT Dinas Pendidikan kota Binjai yakni Zaini ,M.Pd sebagai berikut :

Dalam menunjang pendidikan karakter di Satuan Pendidikan, kami Dinas pendidikan telah memberikan dukungan sumber-sumber belajar dan buku pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan karakter kepada sekolah...Seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan yang ada di setiap sekolah berbeda-beda tingkat kualitasnya, maka Dinas memberikan bantuan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan sekolah...ada sekolah yang memiliki ruang perpustakaan yang luas tetapi memiliki pasokan buku yang sangat terbatas, ada pula sekolah yang tidak memiliki perpustakaan tetapi jumlah buku bancaannya lengkap...namun demikian dukungan sarana belajar terkhusus buku-buku penunjang pendidikan di

perpustakaan sekolah telah menjadi prioritas Dinas untuk memberikan pasokan buku yang mendukung program implementasi pendidikan karakter. (Wawancara, 12 April 2021, Pukul 10.00 wib)

Hal senada juga disampaikan oleh pengawas sekolah dasar dilingkungan Dinas pendidikan kota Binjai, yakni Sumarni S.Pd, MM menjelaskan bahwa : Dukungan dinas pendidikan dalam menunjang program pendidikan karakter yakni memberikan bantuan buku-buku bacaan penunjang perpustakaan dan pengajaran guru di kelas...bantuan ini berdasarkan identifikasi terhadap setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulis dan peragaan sesuai dengan sarana prasaranayang telah disiapkan guru. (Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib)

Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem **sosial** bangsa yang bertujuan untuk mencetak manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan sarana dan

prasarana penunjang kesiapan dari segi sarana dan prasarana pendukung pendidikan karakter.

Hasil observasi yang peneliti lakukan memberikan gambaran bahwa beberapa sarana pendukung pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah antara lain; fasilitas ibadah, tempat temuan barang hilang, kantin kejujuran, tata tertib sekolah, catatan kehadiran, pajangan kata mutiara, media komunikasi dan informasi, perpustakaan, dan sarana kebersihan. Hasil observasi terhadap sarana dan prasarana tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sarana yang tidak tersedia di sekolah, yaitu tempat temuan barang hilang dan kantin kejujuran. Terdapat kekurangan dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu; pemanfaatan yang belum optimal dan pemeliharaan yang kurang. Sarana dan prasarana pendukung yang ada dapat dimanfaatkan sebagai wahana pembentukan karakter, misal fasilitas tempat cuci tangan dapat untuk menanamkan kebiasaan sehat mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, namun pembiasaan semacam itu baru terjadi di satu sekolah yang diamati.

4. Implementasi pendampingan pelaksanaan program pada satuan pendidikan

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, hal yang terpenting dalam ketercapaian keberhasilannya yakni adanya proses pendampingan di sekolah. Sebagaimana informasi yang penulis kumpulkan dari narasumber dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa semua sekolah dasar negeri yang ada di Kota Binjai telah dilakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan program pendidikan karakter, pendampingan tersebut menyangkut dengan pendampingan

teknis pelaksanaan dan implementasi kurikulum yang terintegrasi pendidikan karakter. Hasil wawancara dengan UPDT Dinas Pendidikan kota Binjai yakni Zaini, M.Pd sebagai berikut :

Pendampingan kepada sekolah telah dilaksanakan oleh UPDT dinas Pendidikan untuk menunjang kesiapan dari segi tenaga pendidik....pendampingan terhadap kompetensi guru untuk dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran berkaitan erat dengan pemahaman guru tentang pendidikan karakter melalui sosialisasi kepada guru sehingga guru mendapatkan sosialisasi yang cukup. (Wawancara, 12 April 2021, Pukul 10.00 wib)

Hasil wawancara dengan UPDT Dinas Pendidikan kota Binjai yakni Drs. Edi Tampubolon sebagai berikut :

Pendampingan diberikan melalui program-program dan tenaga dalam forum Kelompok Kerja Guru (KKG) yang dinilai efektif. Namun demikian...tidak semua kegiatan guru atau sekolah dalam implementasi pendidikan karakter mendapatkan pendampingan sebab keterbatasan tenaga ahli yang dimiliki...saat ini pendampingan yang intensif dilakukan oleh para pengawas sekolah. (Wawancara, 12 April 2021, Pukul 10.00 wib)

Hal senada juga disampaikan oleh pengawas sekolah dasar dilingkungan Dinas pendidikan kota Binjai, yakni Sumarni, S.Pd, M.M menjelaskan bahwa :

Pendampingan yang kami berikan kepada kepala sekolah dan guru menyatakan bahwa kepala sekolah dan guru pada umumnya menunjukkan sikap yang baik selama di berikan pendampingan oleh kami pengawas sekolah...Satu-

satunya hal negatif yang teramati adalah masalah kedisiplinan waktu yang tidak baik. Di beberapa sekolah, guru gagal menunjukkan contoh yang benar untuk selalu menghargai waktu. Kebiasaan guru datang terlambat akan membentuk kebiasaan serupa kepada siswa. (Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib)

Hal tersebut dikonfirmasi dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan memang masih terdapat beberapa guru di sekolah rintisan program pendidikan karakter belum sepenuhnya mampu melaksanakan program pendidikan karakter. Sedangkan sebagian sekolah telah menunjukkan bahwa pendidikan karakter telah diintegrasikan pada rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah hingga perencanaan pembelajaran dalam kelas. Kegiatan pembelajaran yang ideal untuk pendidikan karakter adalah pendekatan belajar siswa aktif. Dari tiga kelas di sekolah rintisan yang diobservasi, didapati bahwa hanya dua guru yang benar-benar menerapkan metode belajar aktif dan menyenangkan. Selebihnya, guru masih mengajar dengan metode konvensional yang didominasi oleh ceramah. Kehadiran guru juga tidak tergantikan oleh unsur lain. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan lulusan berkualitas. Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Melalui sentuhan guru diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang bukan hanya cerdas secara intelektual, melainkan juga cerdas secara emosional dan spiritual, serta memiliki kecakapan hidup. Dalam keseluruhan proses pendidikan karakter, guru merupakan faktor utama yang bertugas sebagai pendidik. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar siswa melalui interaksi belajar mengajar. Dengan demikian, peran guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter

di sekolah adalah memberikan keteladanan, inspirator, motivator, dinamisator, dan evaluator.

5. Implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di satuan pendidikan.

Pengawasan pendidikan karakter di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien, karena didukung proses manajemen pendidikan yang tepat. Sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik, hanya akan menghasilkan tersendatnya laju organisasi, yang pada akhirnya tujuan pendidikan karakter tidak akan pernah tercapai secara semestinya. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan pendidikan karakter dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan, di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Pengawasan pendidikan karakter yang dilaksanakan Dinas Pendidikan kota Binjai terhadap implementasi pendidikan karakter dilaksanakan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter telah dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan semula. Pengawasan dilakukan oleh pengawas sekolah dan pelaksana UPDT Dinas pendidikan yang bekerjasama dengan kepala sekolah. Berikut hasil wawancara yang dihimpun dilapangan.

Hasil wawancara dengan UPDT Dinas Pendidikan kota Binjai yakni Budi Darma, M.Pd sebagai berikut :

Tugas monitoring didelegasikan kepada pengawas sekolah. Pengawas yang akan turun lapangan untuk mendampingi sekolah dan membantu sekolah secara langsung ketika ada kendala. Salah satu kendala dalam pelaksanaan monitoring di lapangan adalah lokasi sekolah yang menyebar di setiap daerah. Terkait dengan evaluasi program, pihak dinas mengakui memang belum ada evaluasi terperinci mengenai keterlaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Evaluasi dilakukan pada kelengkapan dokumen misal kurikulum. (Wawancara, 12 April 2021, Pukul 10.00 wib)

Hasil wawancara dengan UPDT Dinas Pendidikan kota Binjai yakni Drs. Edi Tampubolon sebagai berikut :

Evaluasi dilakukan berdasarkan informasi hasil pemantauan yang dilakukan secara formal oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah maupun guru dilapangan. Seperti halnya sekolah melakukan evaluasi, kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi melalui ketercapaian hasil implementasi pendidikan karakter dalam bentuk nilai karakter siswa yaitu bagaimana manfaat pendidikan yang dialami oleh para peserta didik dengan adanya kebijakan kepala sekolah dalam pendidikan karakter. (Wawancara, 12 April 2021, Pukul 10.00 wib)

Temuan-temuan hasil wawancara di sekolah dasar negeri rintisan mendapatkan informasi bahwa beberapa kriteria yang ditetapkan oleh sekolah untuk menggambarkan kinerja kebijakan kepala sekolah yaitu bagaimana efektivitas kebijakan serta efisiensi. Ditinjau dari aspek efektivitas kebijakan, baik kepala sekolah maupun guru menilai bahwa pencapaian saat ini cukup

memuaskan seperti adanya peningkatan partisipasi peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan jumlah peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, rutinitas pelaksanaan ibadah shalat dan taushiyah yang semakin baik. Hasil dari kebijakan tersebut yaitu menurunnya angka kenakalan peserta didik di sekolah. Tidak ada peserta didik yang dikembalikan kepada orang tua selama empat tahun terakhir yang disebabkan oleh kenakalan atau pelanggaran lain yang dianggap cukup berat misalnya kedisiplinan.

Ditinjau dari efisiensi alokasi sumber daya pelaksanaan kegiatan baik kepala sekolah maupun guru menilai usaha yang dilakukan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan pencapaian yaitu perubahan sikap dan perilaku siswa yang lebih berkarakter serta kondisi sekolah yang semakin kondusif. Pendekatan yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dalam mengevaluasi hasil-hasil kebijakan cukup beragam. Kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap kinerja kebijakan pendidikan karakter. Informasi hasil evaluasi kinerja kebijakan diberikan laporan baik kepada dinas pendidikan melalui pengawas sekolah maupun para orang tua. Kepala sekolah hanya mengkomunikasikan hasilhasil evaluasi dengan para guru di sekolah. Tujuan pemberian informasi adalah untuk memperbaiki kebijakan serta meningkatkan komitmen dan tanggung jawab sekolah, kepala sekolah dan guru terhadap pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan bersamasama. Wawancara dengan kepala sekolah negeri 28266 yakni Sugiharti, S.Pd, menjelaskan bahwa :

Keberhasilan program pendidikan karakter maupun kegiatan penunjang akan berhasil dengan adanya monitoring dan evaluasi yang baik dan kerjasama antara

dinas pendidikan, kepala sekolah, kerjasama guru dengan orang tua siswa. Salah satu sumber daya yang dioptimalkan oleh sekolah adalah kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian program implementasi pendidikan karakter. (Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib).

Temuan penelitian hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah dasar negeri 028354 yakni Susana, S.Pd., menjelaskan bahwa :

Kepala sekolah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pihak Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dari sisi implementasi kurikulum walaupun tidak secara rutin dilakukan...selain itu, pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui pendelegasian oleh pengawas sekolah, sedangkan prose implementasinya secara umum dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan guru. Guru bertanggung jawab terhadap kegiatannya masing-masing dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah secara lisan. Belum ada dukungan struktur organisasi yang menjelaskan tentang prosedur pertanggungjawaban, maupun pembagian tugas dan pekerjaan dalam pengelolaan pendidikan karakter. (Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib).

Hal senada juga disampaikan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah dasar negeri 028312 yakni Rudi Prayoga, S.Pd, MM. menjelaskan bahwa :

Proses pengendalian atau monev yang dilakukan oleh dinas pendidikan yakni melalui sistem informasi, yakni setiap sekolah memberikan laporan secara rutin melalui sistem on line kepada dinas pendidikan. Dukungan sistem informasi dalam kebijakan sebagai upaya untuk membangun kesepahaman mengenai kebijakan terutama pada tingkat operasional sangat diperlukan. Informasi tidak hanya diperlukan tetapi perlu dikendalikan. Dalam praktiknya pelaporan melalui sistem informasi belum berjalan sepenuhnya, namun demikian pelaporan dapat dilakukan melalui dokumen. Belum terlaksananya sistem informasi di sebabkan belum ada dukungan sistem informasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang sistematis. Biasanya sekolah memberikan laporan evaluasi melalui pertemuan sekolah dengan dinas pendidikan setiap bulannya. (Wawancara, 15 April 2021, Pukul 09.00 wib).

Dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring berbasis sistem informasi kebijakan diakui memang masih belum optimal digunakan sebagai upaya membangun kesepahaman dalam kebijakan. Segala hal yang menyangkut aspek-aspek internal dan eksternal yang berupa informasi dan data belum disajikan dalam sistem informasi terkhusus bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki sistem informasi yang mendukung. Sedangkan sekolah-sekolah yang sistem informasinya telah mendukung tentunya tidak mengalami kesulitan dalam pemberian laporannya, seperti sekolah dilengkapi dengan wide area network yaitu jaringan jaringan koneksi internet yang terhubung dengan sistem informasi Dinas Pendidikan kota Binjai.

Berdasarkan berbagai uraian data di atas melalui penelusuran wawancara kepada responden penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi program pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan dasar di kota Binjai telah dilaksanakan kordinasi, kordinasi yang dilakukan melalui (1) pertemuan dan (2) rapat-rapat.
2. Dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter meliputi; (1) membuat edaran tertulis kepada UPTD mengenai kebijakan pendidikan karakter; (2) memberikan sosialisasi pada sekolah-sekolah, baik dengan anggaran pemerintah kota Binjai sendiri maupun sebagai pelaksana program pemerintah pusat; (3) hadir dalam uji publik kurikulum sekolah untuk melihat sampai sejauh mana itu pendidikan karakter sudah termuat dalam kurikulum sekolah; dan (4) pendampingan ke sekolah, meskipun tidak secara khusus untuk pendidikan karakter tetapi peningkatan mutu sekolah secara umum, (5) memberikan pelatihan meskipun masih dinilai belum maksimal.
3. Dukungan sarana dan prasarana yang diberikan Dinas Pendidikan bagi pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah antara lain yakni memberikan dukungan sarana belajar dan pedoman kurikulum. Sedangkan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia disekolah seperti fasilitas ibadah, tempat temuan barang hilang, kantin kejujuran, tata tertib sekolah, catatan kehadiran, pajangan kata mutiara, media komunikasi dan informasi, perpustakaan, dan sarana kebersihan.

4. Dinas Pendidikan telah memberikan pendampingan terhadap penyelenggaraan program pendidikan karakter, seperti pendampingan teknis pelaksanaan dan implementasi kurikulum yang terintegrasi pendidikan karakter.
5. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap implementasi pendidikan karakter dilakukan secara terpadu, yakni dinas pendidikan melalui pengawas sekolah, Kepala sekolah, guru dan orang tua siswa. Hasil pelaksanaan evaluasi kinerja kebijakan dilaporkan baik kepada dinas pendidikan melalui pengawas sekolah maupun para orang tua siswa.

4.2.2 Deskripsi Data Kuantitatif

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program pendidikan karakter yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Binjai sudah efektif di tingkat satuan pendidikan dasar negeri di kota Binjai. Pengumpulan data kuantitatif ini dilakukan dengan cara memberikan angket terhadap para guru di Sekolah Dasar Negeri rintisan program pendidikan karakter. Berikut temuan-temuan data kualitatif dalam penelitian ini diuraikan dalam bentuk diagram dan kurva-kurva.

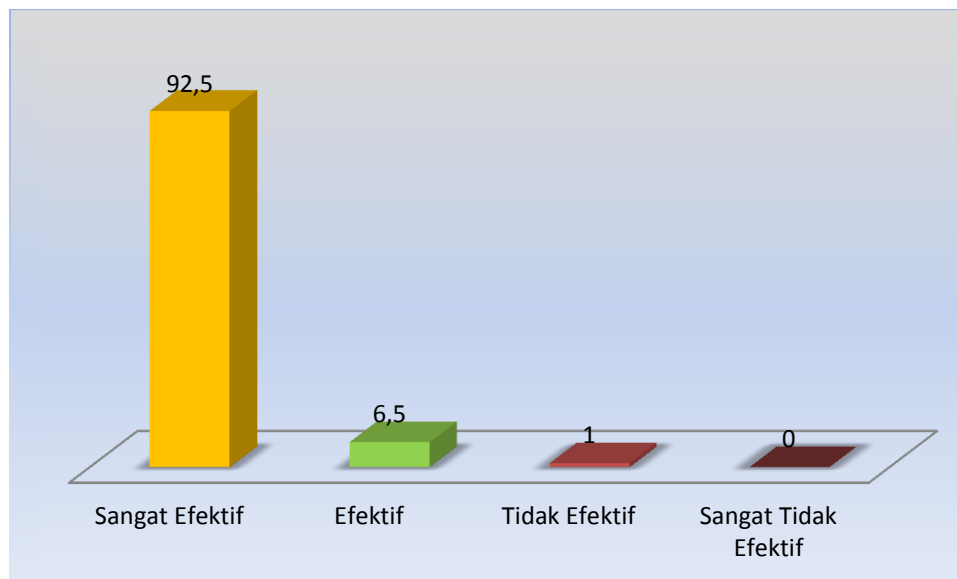
Berdasarkan temuan penelitian di lapangan berikut hasil temuan data penelitian kuantitatif penelitian berkaitan dengan keefektifan pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter oleh Dinas Pendidikan kota Binjai di Sekolah Dasar Negeri Rintisan Kota Binjai.

Tabel 4.1 Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Rintisan

No	Aspek	Kriteria (%)			
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Kebijakan program penguatan pendidikan karakter sudah dirumuskan sesuai dengan karakter yang diharapkan	80,3 %	19,7 %	0 %	0 %
2	Kebijakan program penguatan pendidikan karakter bersifat memberdayakan masyarakat dalam hal ini sekolah-sekolah	94,5 %	5,5 %	0 %	0 %
3	Kebijakan program penguatan pendidikan karakter sesuai dengan apa yang telah direncanakan	89,1 %	10,9 %	0 %	0 %
4	Sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai model pendidikan karakter melaksanakan pendidikan karakter dengan baik	95,4 %	3,6 %	1,0 %	0 %
5	Pelaksana kegiatan dalam hal ini sekolah memahami, bahwa kebijakan pendidikan karakter bersifat sebagai program yang diperlukan untuk masa depan pendidikan karakter	97,2 %	2,8 %	0 %	0 %
6	Sekolah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan	96,5 %	4,5 %	0 %	0 %
7	Sekolah telah ikut serta dan menjadi bagian dari dari pengambil kebijakan program pendidikan karakter	84,3 %	9,7 %	6,0 %	0 %
	Rata-Rata	92,5 %	6,5 %	1,0 %	0 %

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil survei menjelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai kepada sekolah-sekolah dasar negeri rintisan di kota Binjai menunjukkan bahwa responden menyatakan penguatan pendidikan karakter oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai kepada sekolah-sekolah dasar negeri rintisan di kota Binjai sangat memuaskan atau (92,5%), memuaskan (6,5%) dan tidak memuaskan (1,0%) sedangkan sangat tidak memuaskan (0%). Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa program penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai kepada Sekolah Dasar Negeri Rintisan dinilai sudah efektif ditinjau dari tingkat kepuasan para guru dan kepala sekolah dalam

pelekasnaan implementasi pendidikan karakter yang dicanankan Dinas Pendidikan Kota Binjai.



Gambar 4.1 Tingkat Keefektifan Program Penguatan Karakter

Berdasarkan temuan data kuantitatif ini memberikan gambaram bahwa pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai kepada sekolah-sekolah dasar negeri rintisan telah terlaksana dengan baik dan efektif. Tingkat keefektifan tersebut tergambar dari 92,5 % responden di Sekolah Dasar Negeri Rintisan di Kota Binjai menyatakan sangat efektif.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah menunjukkan bahwa program penguatan pendidikan karakter Dinas Pendidikan Binjai telah efektif dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan karakter yang dicanangkan pemerintah Indonesia melalui program pendidikan karakter kementrian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan keberhasilan

penyelenggaraan pendidikan karakter seperti dinyatakan oleh Bahm (2012:7) tidak hanya dapat dilihat dari adanya keterlibatan sekolah namun seluruh stakeholder sekolah. Artinya pendidikan karakter yang terjamin adalah pada saat sistem pendidikan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam mempersiapkan sebuah proses yang sistematis dan terencana. Keterlibatan tersebut akan terwujud dengan adanya sistem yang menjamainya yang dihasilkan dari keterlibatan para stakeholder. Hal yang sama disampaikan oleh Berkowit dan Bustamante (2013:9) yang memberikan gambaran tentang model pendidikan karakter yang disusun berdasarkan praktik-praktik terbaik yaitu model PRIME. Salah satu elemen inti dalam model tersebut yaitu adanya perkembangan positif hubungan baik diantara para stakeholder. Hubungan tersebut mengarah pada keterlibatan penuh dan komitmen untuk mendukung keberadaan pendidikan karakter. Keberhasilan sekolah menyediakan sistem yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pelanggan terhadap pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Reichenbacher dan Einax (2011:2) menjelaskan bahwa penjaminan mutu meliputi seluruh kegiatan yang difokuskan pada pemenuhan mutu sesuai dengan kebutuhan yang memberikan rasa puas. Guna memberikan kepuasan maka diperlukan dukungan dan keterlibatan dalam perancangan sistem penjaminan mutu internal dalam pendidikan karakter.

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter saat ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membenahi potret pendidikan yang semakin merosot. Program penguatan pendidikan karakter sendiri bukan merupakan program yang baru dicanangkan pemerintah, melainkan program ini

sudah ada sejak tahun 2010. Maka pemerintah pada tahun 2016 menggaet kembali pendidikan karakter sebagai tiang pendidikan untuk menekan berbagai perilaku buruk generasi bangsa. PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Jadi dapat disimpulkan penguatan pendidikan karakter adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*), seperti jujur, peduli, disiplin, toleransi, kerja keras, cinta damai, tanggung jawab, cinta tanah air dan sebagainya. Dengan demikian peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai karakternya. Ada berbagai cara yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan karakter melalui mutu pendidikan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan bagi peserta didik dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan, sikap serta ketrampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Kemampuan ini harus dikembangkan lagi untuk meningkatkan taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik bagi kehidupan peserta didik. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi

pembawaan bagi jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pada proses pembelajaran terdapat karakter yang perlu ditekankan melalui berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah maupun pihak sekolah sendiri. Kemendiknas (2011), telah mengidentifikasi 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik yang bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah program penguatan pendidikan karakter peserta didik belum menunjukkan terbentuknya karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas yang diharapkan oleh sekolah. Pendidikan karakter diharapkan dapat menekan perkembangan hal-hal buruk yang akan terjadi terkait dengan pemerosotan karakter. Ramli dalam Aqib (2011: 3) menyatakan bahwa pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi

Penelitian yang dilaksanakan mengenai program penguatan pendidikan karakter Dinas Pendidikan Kota Binjai di Sekolah Dasar Negeri Rintisan kota

Binjai dapat dijabarkan beberapa hal yaitu ada beberapa faktor yang mendukung proses terlaksananya program penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan sekolah dasar yaitu adanya dukungan pelatihan, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta pendampingan. Selain itu adanya kesiapan dari sekolah-sekolah dimana sekolah-sekolah sudah membuat program pembiasaan yang dilaksanakan guna membentuk dan meningkatkan karakter peserta didik menjadi lebih baik, selain itu faktor lainnya di dapat dari guru kelas yang sudah mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. Faktor yang menghambat proses terlaksananya penguatan pendidikan karakter di sekolah yaitu di dapat dari guru yang masih belum terbiasa dengan adanya program pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sehingga guru tersebut belum berubah gaya mengajarnya dan sikap kedisiplinan guru. Selain itu faktor lain yang menghambat adalah masih terdapat sistem informasi sekolah yang belum ditunjang teknologi. Pengamatan juga dilakukan oleh peneliti melalui kegiatan observasi kepada peserta didik saat kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan observasi tersebut peneliti menganalisis bahwa kegiatan yang dilakukan peserta didik sudah sesuai dengan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter, dimulai dari berdoa sebelum pembelajaran, menyanyikan mars PPK setelah kegiatan apel hingga bekerja sama dalam hal kebersihan saat kegiatan jum'at bersih dengan teman. Pembiasaan melalui kegiatan-kegiatan tersebut memang efektif untuk membentuk nilai karakter peserta didik untuk menjadi lebih baik. Hal ini sudah sesuai dengan Kemendikbud (2016: 7-9) yang menyatakan bahwa kelima nilai utama karakter saling berkaitan

membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK.

Selain dalam pengamatan, peneliti juga melakukan survei kepada responden penelitian untuk menilai apakah pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter telah efektif. Temuan penelitian menunjukkan 92,5% responden menyatakan sangat setuju. Ini berarti pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter oleh Dinas Pendidikan di nilai sudah efektif, 5,5% responden menyatakan efektif, sedangkan sebanyak 1% responden menyatakan belum efektif. Berdasarkan temuan hasil survei inipenguatan pendidikan karakter sudah sesuai dengan nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam PPK. Menurut Kemendikbud (2016:9) ada lima nilai utama karkter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Hal ini sejalan dengan pendapat Paudel (2009, hlm.39) yang menjelaskan bahwa dua faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah kapasitas dan kemauan politik yang tertuang dalam kebijakan untuk memecahkan masalah. Kapasitas dapat dilihat dari kemampuan untuk melaksanakan tahapan dalam perumusan kebijakan dan kemauan dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Temuan penelitian ini menyimpulkan :

1. Implementasi program pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan dasar di kota Binjai telah dilaksanakan kordinasi, kordinasi yang dilakukan melalui (1) pertemuan dan (2) rapat-rapat.
2. Dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter meliputi; (1) membuat edaran tertulis kepada UPTD mengenai kebijakan pendidikan karakter; (2) memberikan sosialisasi pada sekolah-sekolah, baik dengan anggaran pemerintah kota Binjai sendiri maupun sebagai pelaksana program pemerintah pusat; (3) hadir dalam uji publik kurikulum sekolah untuk melihat sampai sejauh mana itu pendidikan karakter sudah termuat dalam kurikulum sekolah; dan (4) pendampingan ke sekolah, meskipun tidak secara khusus untuk pendidikan karakter tetapi peningkatan mutu sekolah secara umum, (5) memberikan pelatihan meskipun masih dinilai belum maksimal.
3. Dukungan sarana dan prasarana yang diberikan Dinas Pendidikan bagi pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah antara lain yakni memberikan dukungan sarana belajar dan pedoman kurikulum. Sedangkan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia disekolah seperti fasilitas ibadah, tempat temuan barang hilang, kantin kejujuran, tata tertib sekolah, catatan kehadiran,

pajangan kata mutiara, media komunikasi dan informasi, perpustakaan, dan sarana kebersihan.

4. Dinas Pendidikan telah memberikan pendampingan terhadap penyelenggaraan program pendidikan karakter, seperti pendampingan teknis pelaksanaan dan implementasi kurikulum yang terintegrasi pendidikan karakter.
5. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap implementasi pendidikan karakter dilakukan secara terpadu, yakni dinas pendidikan melalui pengawas sekolah, Kepala sekolah, guru dan orang tua siswa. Hasil pelaksanaan evaluasi kinerja kebijakan dilaporkan baik kepada dinas pendidikan melalui pengawas sekolah maupun para orang tua siswa.
6. Pelaksanaa kn program penguatan pendidikan karakter telah efektif. Temuan penelitian menunjukkan 92,5% responden menyatakan sangat setuju. Ini berarti pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter oleh Dinas Pendidikan di nilai sudah efektif, 5,5% responden menyatakan efektif, sedangkan sebanyak 1% responden menyatakan belum efektif.

5.2 Implikasi

Adapun implikasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengingat program penguatan pendidikan karakter sangat berdampak terhadap peningkatan karakter peserta didik, maka perlu adanya kordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan.

2. Agar program penguatan pendidikan karakter dapat terlaksana dengan efektif, maka perlu adanya dukungan pendampingan kepada sekolah dalam implementasi pendidikan karakter.
3. Perlu memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada sekolah agar pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik.

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Kepada Dinas pendidikan kota Binjai program pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan dasar di kota Binjai dilaksanakan melalui kordinasi, kordinasi yang dilakukan melalui (1) pertemuan dan (2) rapat-rapat
2. Perlu memberikan dukungan dari Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter meliputi; (1) membuat edaran tertulis kepada UPTD mengenai kebijakan pendidikan karakter; (2) memberikan sosialisasi pada sekolah-sekolah, baik dengan anggaran pemerintah kota Binjai sendiri maupun sebagai pelaksana program pemerintah pusat; (3) hadir dalam uji publik kurikulum sekolah untuk melihat sampai sejauh mana itu pendidikan karakter sudah termuat dalam kurikulum sekolah; dan (4) pendampingan ke sekolah, meskipun tidak secara khusus untuk pendidikan karakter tetapi peningkatan mutu sekolah secara umum, (5) memberikan pelatihan meskipun masih dinilai belum maksimal.
3. Perlu memberikan dukungan sarana dan prasarana oleh Dinas Pendidikan bagi pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah antara lain yakni

memberikan dukungan sarana belajar dan pedoman kurikulum. Sedangkan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia disekolah seperti fasilitas ibadah, tempat temuan barang hilang, kantin kejujuran, tata tertib sekolah, catatan kehadiran, pajangan kata mutiara, media komunikasi dan informasi, perpustakaan, dan sarana kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi dan Uhbiyati. 2007. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi),Alfabet cv,2006
- Creswell, John W. (2015) Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, terj. Ahmad Lintang Lazuardi dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn,William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dimiyati dan Mudjiono. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta dan Depdikbud. Ahmadi, Abu. 2004. Psikologo Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta
- Fattah, N. 2004. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Febirauqa, N, L. 2012.Manajemen Layanan Khusus Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 1 Pasuruan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 23(5): hlm. 479
- Hasibuan, M, S. P. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. Hidayatullah, F. 2010. Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa. Surakarta: Yuma Pusaka
- Isnaini, R. L. 2016. Penguatan Pendidikan Karakter Siswa melalui Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1): hlm. 36.
- Joko Widodo, Analisis kebijakan Publik, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 97 Budi Winarno, Teori dan proses kebijakan Publik, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hlm 126
- Juara, R. 2017. Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah, (Online), (<https://www.rumahjuara.com/artikel/214/implementasi-program-penguatan-pendidikan-karakter-di-sekolah>), diakses 25 Januari 2018.
- Judiani, S. 2010. Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 16(3): hlm.282, (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/138571-ID-implementasi-pendidikan-karakter-di-seko.pdf>), diakses 25 Januari 2018.
- Kesuma, D., Triatna, C., & Permana, J. 2012. Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kurniadin, D. & Machali, I. 2012. Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Kurniawan, S. Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, & Masyarakat. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kesuma, Dharma. (2013). *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Megawangi (2004). Pendidikan karakter. Jakarta. Yayasan Obor
- Muhamimin Azzet, Akhmad. (2014). *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan Karakter terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa, H.E. (2012). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, MB, and Huberman, AM.(2014). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta
- Mirulloh. (2015). *Teori Pendidikan Karakter Remaja*. Bandung: Alfabeta.
- Lalu Said Ruhpina, Menuju Demokrasi Pemerintahan, Universitas Mataram Press, Mataram,2005
- Purwanto, M, N. 2014. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robert T. Nakamura and Frank Smallwood, The Politics of Policy Implementation, St. Martin's. Press, New York, hlm.145 J
- Riant Nugroho, Kebijakan Publik di Negara – Negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2014,hlm. 126
- Rifai. Muhammad. 2011. Politik Pendidikan Nasional. Jogjakarta: ARRUIZZ MEDIA
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta 2005, hlm. 246
- Salahudin, Anas & Alkrienciehie, Irwanto. (2013). *Pendidikan Karakter (Pendidikan Berbasis Agama Dan Budaya Bangsa)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samani, Muchlas & Hariyanto. (2013). *Konsep Dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Ulfatin, N. 2015. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya. Malang:Media Nusa Creative

- Wibowo, Agus. (2013). *Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja. Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wiyono, B. B. & Sunarni. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan dan Pembelajaran*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
- Zubaedi. (2012). *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.
- Zusnani, Ida. (2012). *Manajemen Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa*. Jakarta Selatan: Tugu Publisher.

Lampiran 1 : Instrumen wawancara terbuka dan tertutup

Panduan Wawancara :

1. Bagaimana pihak Dinas Pendidikan melakukan kordinasi dengan satuan pendidikan
2. Bagaimana pihak Dinas Pendidikan memberikan dukungan pelaksanaan program pada satuan pendidikan
3. Bagaimana pihakn Dinas Pendidikan memberikan dukungan sarana dan prasarana program pada satuan pendidikan
4. Bagaimana pihkan Dinas Pendidikan memberikan pendampingan pelaksanaan program pada satuan pendidikan;
5. Bagaimana pihak Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di satuan pendidikan

Lampiran 2 : Wawancara Tertutup

Instrumen Tertutup

No	ASPEK YANG DIPERTANYAKAN	SKOR
1	Kebijakan program penguatan pendidikan karakter sudah dirumuskan sesuai dengan karakter yang diharapkan	1 2 3 4 5
2	Kebijakan program penguatan pendidikan karakter bersifat memberdayakan masyarakat dalam hal ini sekolah-sekolah	1 2 3 4 5
3	Kebijakan program penguatan pendidikan karakter sesuai dengan apa yang telah direncanakan	1 2 3 4 5
4	Sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai model pendidikan karakter berbabsis kearifan lokal melaksanakan pendidikan karakter berbabsis kearifan lokal dengan baik	1 2 3 4 5
5	Pelaksana kegiatan dalam hal ini sekolah memahami, bahwa kebijakan pendidikan karakter bersifat sebagai program yang diperlukan untuk masa depan pendidikan karakter	1 2 3 4 5
6	Sekolah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan	1 2 3 4 5
7	Sekolah telah ikutserta dan menjadi bagian dari dari pengambil kebijakan program pendidikan karakter berbabsis kearifan lokal	1 2 3 4 5

SKOR TOTAL

$$Nilai = \frac{SKOR\ TOTAL}{35} \times 100$$

Lampiran 2 : Lembar Angket Siswa

Karakter	Indikator
Jujur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak merokok 2. Berkata jujur 3. Mengembalikan barang 4. Melaporkan barang temuan
Disiplin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu mengikuti kegiatan 2. Hadir tepat waktu 3. Mematuhi aturan yang telah disepakati 4. Membayar iuran
Percaya diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biasa berbicara di depan umum 2. Mengerjakan tugas individu secara mandiri
Peduli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan teman 2. Memperhatikan kebersihan lingkungan 3. Membantu orang tua 4. Membantu kegiatan di sekolah dengan senang hati
Gigih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membiasakan diri untuk terus belajar 2. Mempraktikkan semua yang telah dipelajari
Toleransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai pendapat orang lain 2. Menerima saran dan kritik 3. Kerja sama yang baik dalam kelompok 4. Baik terhadap semua orang